

Naskah Sumber Arsip Kemaritiman



anri

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NASKAH SUMBER ARSIP KEMARITIMAN

Ketua

Agus Santoso

Editor

Senja Kala Yahya

Anggota

Abdul Cholik

Bayu Patriasari

Desi Mulyaningsih

R. Suryagung SP.

Sapta Sunjaya

Desain Grafis & Lay Out

Beny Oktavianto

Copyright @ARSIP NASIONAL RI – PA 2015
UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan



KATA PENGANTAR

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Penyelenggaraan kearsipan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya (pasal 3 h).

ANRI menyajikan berbagai sumber informasi berbasis arsip, arsip statis yang mempunyai nilai guna informasi bagi publik. Khasanah arsip tentang Kemaritiman yang tersimpan di ANRI tidak saja sebagai bahan bukti penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang tercipta pada masa lampau, tetapi memiliki makna lintas waktu, lintas peristiwa dan lintas geografi. Arsip sebagai sumber ingatan mempertebal identitas bangsa yang pada gilirannya menjadi simpul pemersatu bangsa.

Penerbitan Naskah Sumber Arsip Kemaritiman merupakan upaya ANRI dalam membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk mempelajari berbagai aspek kehidupan dan keilmuan dalam perspektif kemaritiman. Arsip sebagai bukti aktifitas kemaritiman di wilayah geografis Indonesia yang tercipta sejak masa Pemerintahan VOC hingga kolonial Belanda dan Pasca Kemerdekaan.

Arsip yang disajikan dalam naskah sumber arsip Kemaritiman sejak masa Pemerintahan VOC hingga kolonial Belanda dan Indonesia. Selain itu Naskah Sumber Arsip Kemaritiman juga memuat informasi **pelabuhan dagang dan perikanan; peranan jaringan pelayaran dan perdagangan serta peran lokal & tradisional; transportasi sungai, hilir pelabuhan laut** sebagai bagian dari kekayaan informasi atas khasanah kemaritiman di Indonesia. Penerbitan naskah sumber arsip diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme serta penguatan karakter bangsa yang pada gilirannya dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman makna pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, Oktober 2015

Kapala Arsip Nasional RI

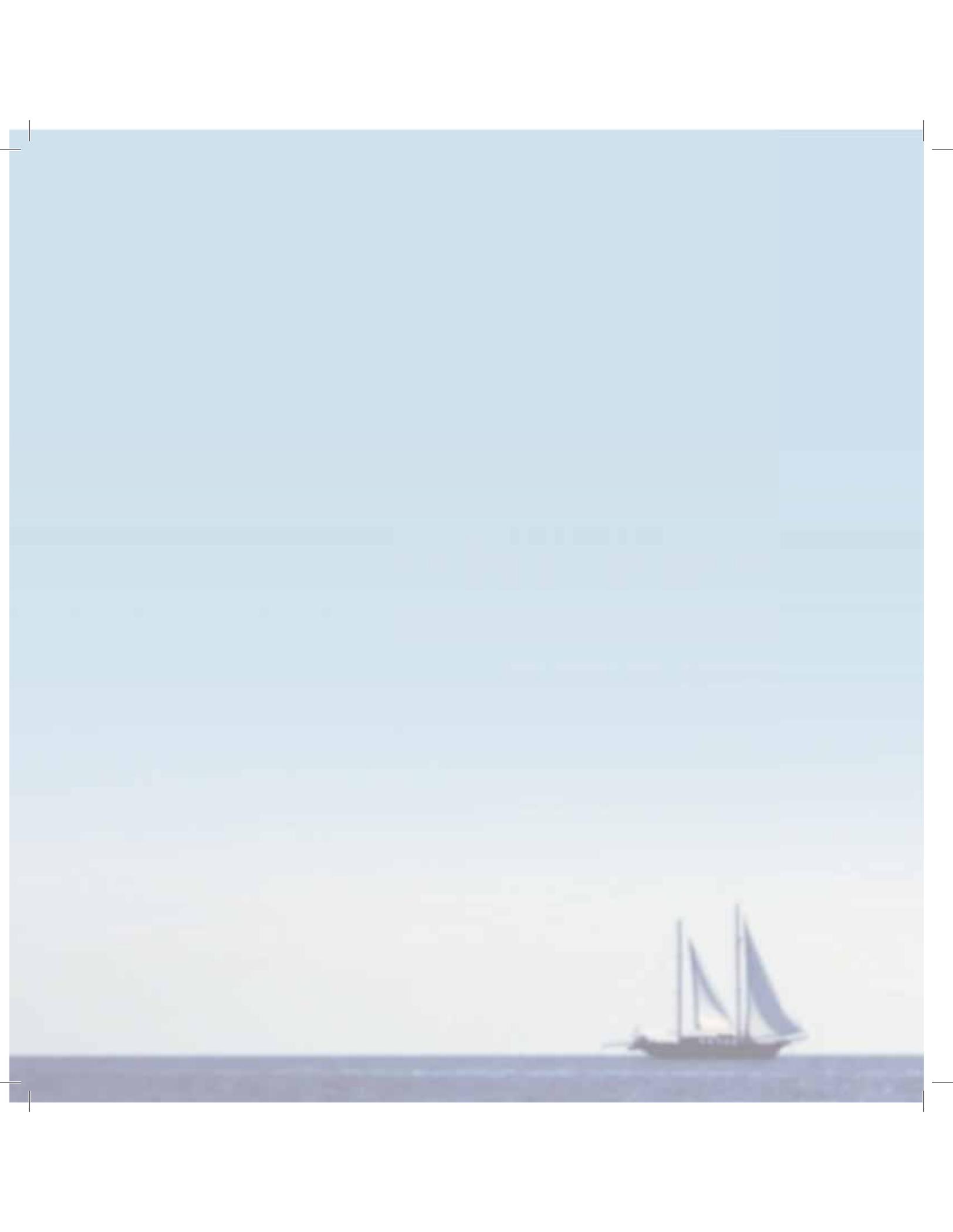
Naskah Sumber Arsip Kemaritiman

iii



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL _____ | i |
| KATA PENGANTAR _____ | iii |
| DAFTAR ISI _____ | v |
| BAB I DASAR PEMIKIRAN _____ | 1 |
| Latar Belakang _____ | 1 |
| Arsip Sebagai Sumber _____ | 4 |
| BAB II SEKILAS SUMBER ARSIP _____ | 7 |
| Periode VOC sampai Pemerintahan Kolonial _____ | 8 |
| Pasca Kemerdekaan _____ | 36 |
| BAB III KEMARITIMAN DI INDONESIA _____ | 45 |
| Pelabuhan Dagang dan Pelabuhan Perikanan _____ | 45 |
| Peranan Jaringan Pelayaran dan Perdagangan _____ | 78 |
| Peranan Lokal dan Tradisional: Transportasi Sungai, Hilir Pelabuhan Laut _____ | 96 |
| BIBLIOGRAFI _____ | 116 |



Latar Belakang

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (+ 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah Negara Maritim memiliki kriteria:

- a. Berdaulat di wilayah NKRI dan disegani negara lain atas wilayahnya;
- b. Menguasai seluruh wilayah darat dan laut melalui *effective occupancy* dan memiliki *sea power* yang diandalkan secara nasional dan global;
- c. Mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan sesuai aturan nasional dan internasional;
- d. Menghasilkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan demikian maka keterpaduan darat dan laut dalam pembangunan menjadi dasar spasial serta berorientasi pada wawasan nasional maupun global dengan mengutamakan kepentingan nasional.

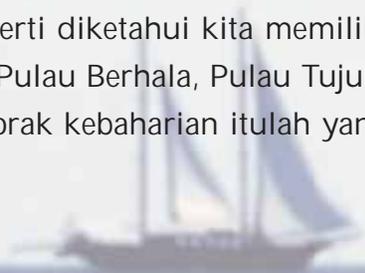
Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain Industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran pertahanan, serta industri maritim dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sejarah Maritim memegang peranan penting dalam kajian komunikasi lintas budaya, antara satu komunitas dengan komunitas yang lain yang menjadi dasar bagi proses integrasi masyarakat Indonesia. Laut memiliki peranan penting sebagai media komunikasi bagi proses pembentukan bangsa Indonesia, laut mengandung dinamika yang menciptakan kesatuan, hubungan antarmanusia dan antarbangsa lewat transportasi, perdagangan, dan pertemuan budaya. Perwujudan dari kemajuan budaya antara lain dapat dilihat dari tumbuhnya kota-kota pantai dengan pelabuhannya yang menjadi pusat dinamika perdagangan, pelayaran, dan teknologi perkapalan serta pusat kekuatan politik.

Tanpa mengingkari bahwa negara kolonial menjadi pendahulu langsung dari negara Republik Indonesia, periode pra-kolonial telah menunjukkan adanya proses-proses interrelasi di antara wilayah-wilayah dan kebudayaan yang ada, yang dalam kerangka lebih luas dapat dipandang sebagai bagian dari proses integrasi bangsa.

Pada tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan **Deklarasi Djuanda** yang menawarkan konsep Negara Kepulauan dengan batas laut teritorial sejauh 12 mil. Pada tahun 1982, *International Conference on Sea Law* meratifikasi konsep Indonesia mengenai **Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)**. Berdasarkan Deklarasi ZEE inilah wilayah teritorial Indonesia menjadi utuh, baik mencakup wilayah darat maupun laut.

Negara Maritim merupakan negara yang mengontrol dan memanfaatkan laut sebagai syarat mutlak untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaannya. Batas Maritim ditandai dengan pulau-pulau terdepan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sekitar 80% dari kawasan ini adalah laut. Laut bukan pemisah pulau-pulau, tetapi sebagai pengikat pulau-pulau. Konsep yang dikembangkan Indonesia yang mengacu kepada makna negara kepulauan harus diganti dengan konsep negara bahari atau *buana bahari*, yaitu negara laut yang memiliki banyak pulau. Seperti diketahui kita memiliki ribuan pulau, beberapa memiliki nama yang sama seperti Pulau Berhala, Pulau Tujuh, Pulau Air. Kondisi geografis dan ekologis yang lebih bercorak kebaharian itulah yang



menempa Bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari dalam perjalanan sejarahnya.

Latar belakang tersebut diatas diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam mengangkat dan mempertahankan konsep-konsep dalam berbagai yang menjadi citra potensi sumber daya yang selama ini terpendam, seperti Maluku yang tidak hanya sebagai propinsi maritim tapi juga propinsi kepulauan. Dimana pulau-pulau bukan sebagai pemecah belah tetapi sebagai sebagai pemersatu. Negara bahari tidak akan terbentuk tanpa landasan budaya bahari. Sejarah bahari atau sejarah maritim menjadi bagian yang utama dalam menumbuhkan budaya bahari untuk selanjutnya menjadi landasan bagi terbangunnya negara bahari.

Sebagai negara bahari, Indonesia tidak hanya memiliki satu laut utama atau heartsea tetapi paling tidak ada tiga laut utama yang membentuk Indonesia sebagai *sea system* yaitu **Laut Jawa**, **Laut Flores** dan **Laut Banda**.

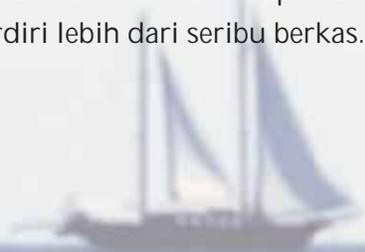
Arsip Sebagai Sumber

Arsip berperan penting sebagai **Memori Kolektif Bangsa**, arsip dapat dipergunakan untuk memaknai sejarah perjalanan bangsa, nilai-nilai yang melandasi semangat perjuangan para pendiri bangsa, serta proses yang berlangsung setelah kemerdekaan berhasil diperoleh.

Misi Arsip Nasional RI yakni memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa, ANRI menjamin publik untuk mengakses arsip statis.

Sumber-sumber arsip yang disajikan pada **Naskah Sumber Arsip Kemaritiman** ini berdasarkan penelusuran dan penelitian sumber-sumber arsip pada khasanah arsip yang tersimpan di ANRI. Sumber-sumber arsip yang tercipta pada masa kolonial dikelompokkan sebagai **Arsip Kolonial**, (berasal sejak masa VOC yang dilanjutkan dengan Pemerintahan Hindia Belanda) dan sumber-sumber arsip yang tercipta *pasca* Kemerdekaan RI, dikelompokkan sebagai **Arsip Republik**.

Sumber-sumber arsip masa kolonial (tahun 1602 sd. tahun 1942) yang tersimpan di *Landsarchief*, berisi arsip-arsip Perserikatan Dagang Hindia Timur (VOC), Masa Inggris (*Engelsche Tussenbestuur IET* atau *British Interregnum*) dan masa Pemerintahan Hindia Belanda. Arsip periode ini menunjukkan begitu banyak informasi yang terekam di dalamnya. Masa Pemerintahan Hindia Belanda meliputi khasanah arsip yang disebut dengan *gewestelijke stukken*, berisi arsip-arsip kegiatan administrasi secara regional, yaitu kegiatan pemerintahan lokal atau setempat berdasarkan pembagian wilayah administrasi yang kemudian disebut dengan **Arsip Keresidenan**. Begitu banyaknya khasanah Arsip Keresidenan yang terakumulasi secara administratif berdasarkan pembagian wilayah pada masa VOC ini. Beberapa Arsip Keresidenan terdiri lebih dari seribu berkas.



Beberapa naskah sumber arsip yang telah diterbitkan ANRI baik secara tematis maupun kegiatan administrasi pemerintahan (seperti Memori Serah Terima Jabatan atau *Memorie van Overgave* pada masa pemerintahan Kolonial) dapat dipandang sebagai upaya ANRI mengungkapkan memori kolektif guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai budaya bangsa dan kebangsaan serta memupuk rasa cinta Tanah Air.

Naskah sumber arsip yang di publikasikan mengenai Kemaritiman sebagai bagian dari khasanah arsip yang tersimpan di ANRI, dengan maksud untuk memberikan pemahaman bahwa kekayaan khasanah

arsip masa kolonial ini melatarbelakangi adanya wilayah kekuasaan Pemerintahan Kolonial yang membentang hampir di seluruh Nusantara. Secara *de facto* menjadi bukti keberadaan Republik Indonesia. Setelah melalui proses yang panjang, secara *de jure* luas wilayah yang menjadi wilayah Indonesia, diungkapkan pada saat Pengakuan Kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1949.

Sumber-sumber arsip yang disajikan selanjutnya dapat dipergunakan sebagai sumber primer dalam melengkapi informasi serta memberikan kontribusi bagi dunia akademik.



Khasanah Arsip yang tersimpan di Arsip Nasional RI, berisi sumber-sumber arsip baik dalam bentuk konvensional (kertas dan kartografik/kearsitekturan) maupun media baru (foto, film dan suara) yang tersimpan dengan baik sejak tahun masa VOC (1602).

ANRI memiliki khasanah arsip statis berdasarkan 2 periode besar, yaitu:

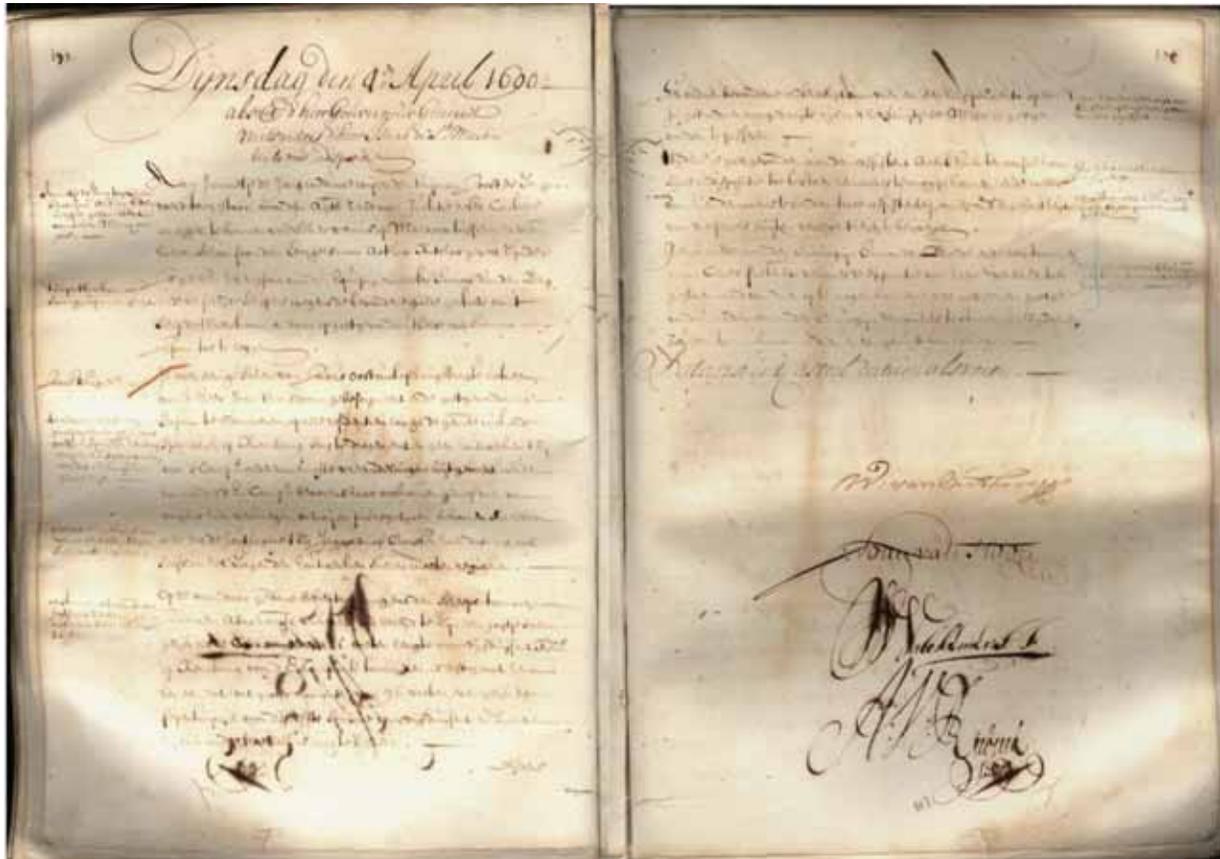
1. **Arsip periode Kolonial (1610-1942)** yang mencakup:
 - a. arsip-arsip VOC yang umumnya menyimpan informasi kegiatan dagang di kawasan Asia dan yang berhubungan dengan raja-raja setempat di kawasan tersebut, termasuk sebagian besar informasi tentang Kepulauan Nusantara dan
 - b. arsip Pemerintahan Kolonial Belanda yang menyimpan informasi dari kegiatan administratif Pemerintah Kolonial Belanda secara luas dan rinci di daerah serta arsip-arsip Keresidenan, yaitu himpunan arsip dari kantor residensi yang mencakup hampir seluruh Nusantara, termasuk di dalamnya arsip periode Inggris. Arsip tahun 1945-1950, yaitu arsip masa NICA (*Netherlands Indie Colonial Administration*) masuk dalam katagori periode Kolonial.
2. **Arsip periode Republik (1945-sekarang)** tidak hanya arsip lembaga/instansi/ badan pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah, tetapi juga koleksi pribadi/ perseorangan dan badan/organisasi swasta.

Arsip statis dapat diakses publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akses arsip statis dapat dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, serta pelayanan publik dengan memperhatikan keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. ANRI memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Periode VOC sampai Pemerintahan Kolonial

Sebagai negara kepulauan, selain saling berhubungan dengan suku bangsa lainnya antar pulau, bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik. Dengan alat navigasi seadanya, mereka telah mampu berlayar ke utara lalu ke barat memotong lautan Hindia hingga Madagaskar dan berlanjut hingga pulau Paskah. Kian ramainya arus pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut, masa itu muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar. Fenomena kehidupan kemaritiman, pelayaran dan perikanan beserta kelembagaan formal dan informal yang menyertainya merupakan kontinuitas dari proses perkembangan kemaritiman Indonesia masa lalu dan aktivitas perdagangan yang memanfaatkan laut sebagai medium pengangkutannya.



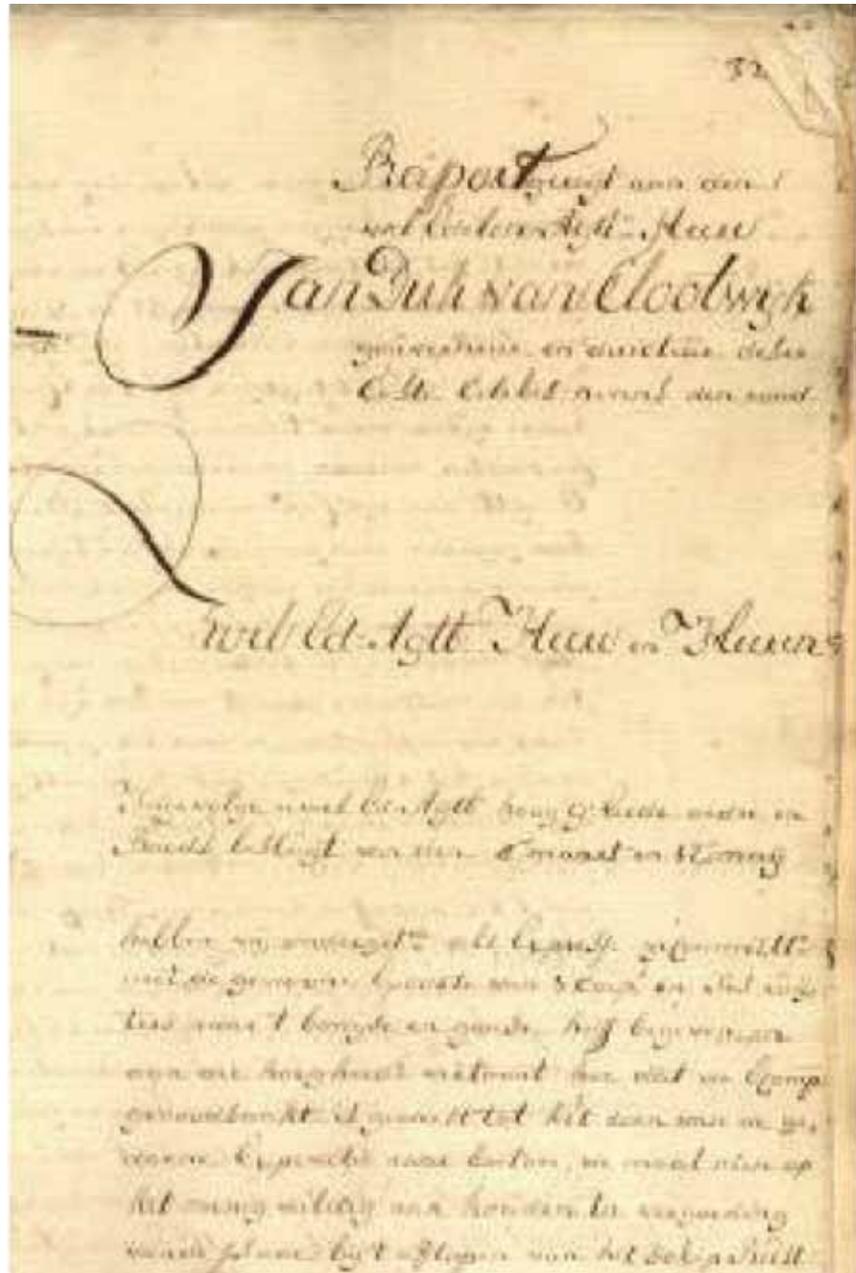


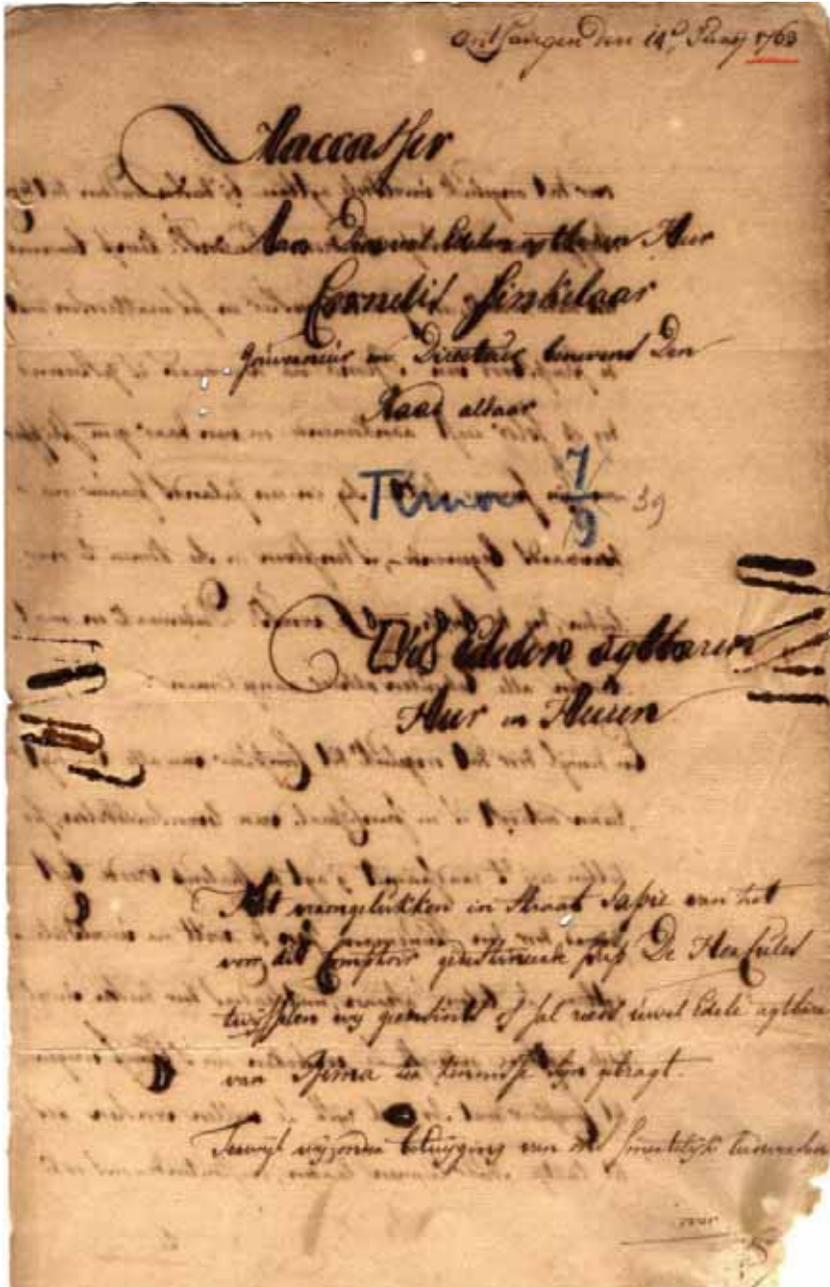
Surat Keputusan Gubernur Jendral tentang pembelian beras di Jambi yang harus dibayarkan secara kontan dan pengirimannya dilakukan dengan menggunakan kapal, 4 April 1690.

ANRI : Hoge Regering No. 904

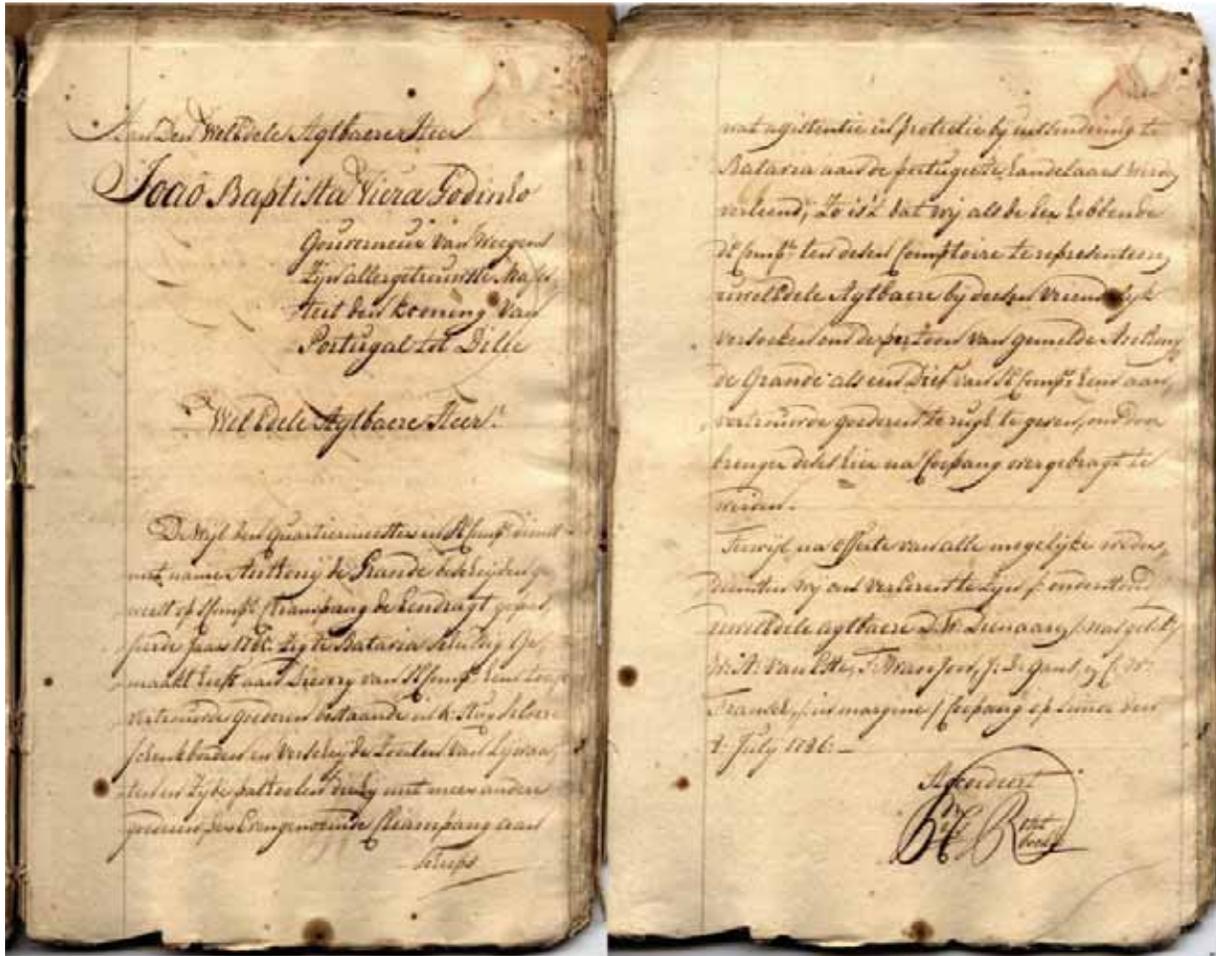
Laporan kepada
Gubernur Sulawesi
dan wilayah sekitarnya
(Gouvernement Celebes
en Onderhoorigheden)
tentang ekspedisi kapal
dagang "Rusten Werk"
ke Buton, 13–20 Mei
1755.

ANRI : Makassar 73



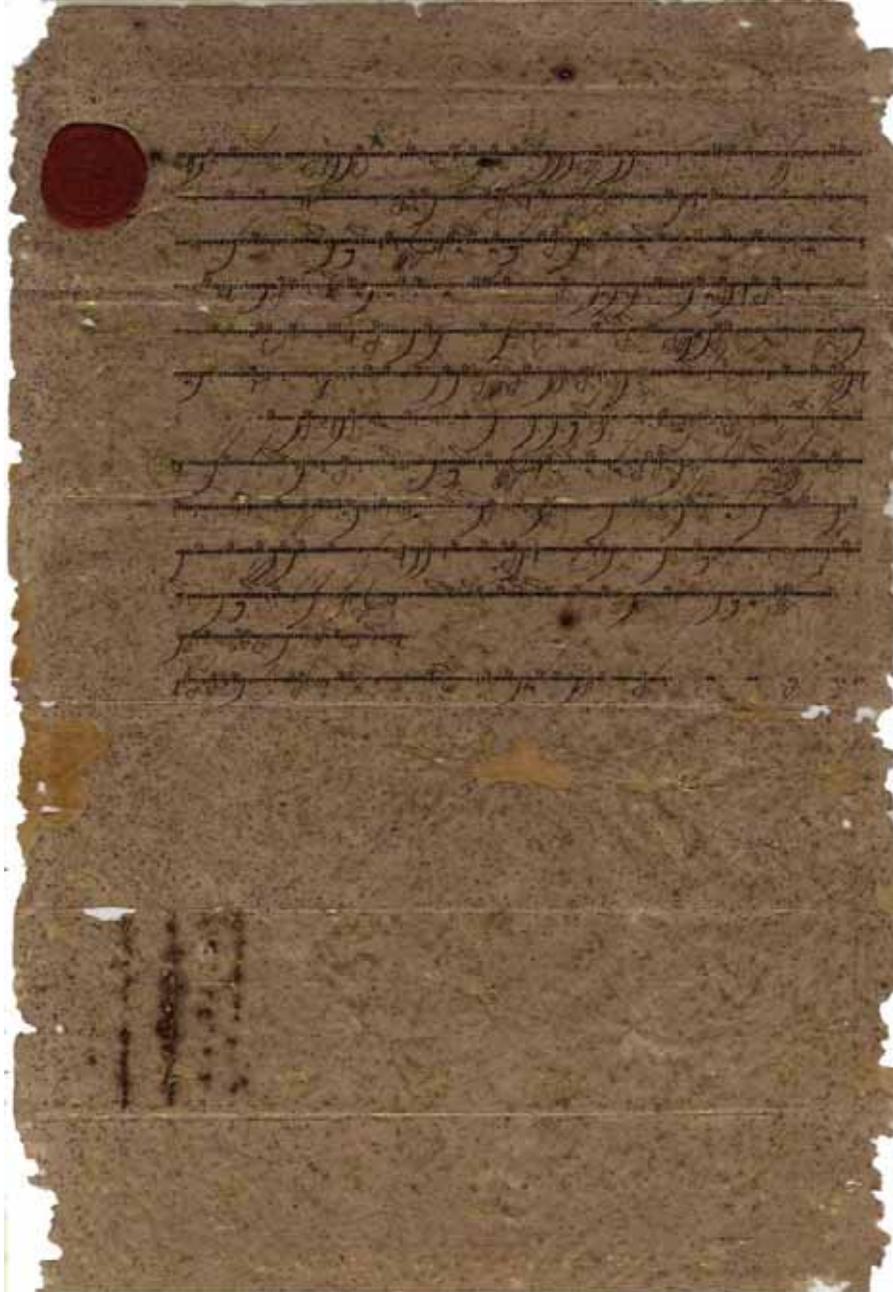


Surat kepada Cornelis Sinkelaar, gubernur di Makasar mengenai musibah kapal de Hercules di Selat Sapie berikut kelasi-kelasi yang menjadi korban. Berita disampaikan oleh pejabat VOC di Bima, 2 Mei 1769 .
ANRI : Timor No.18

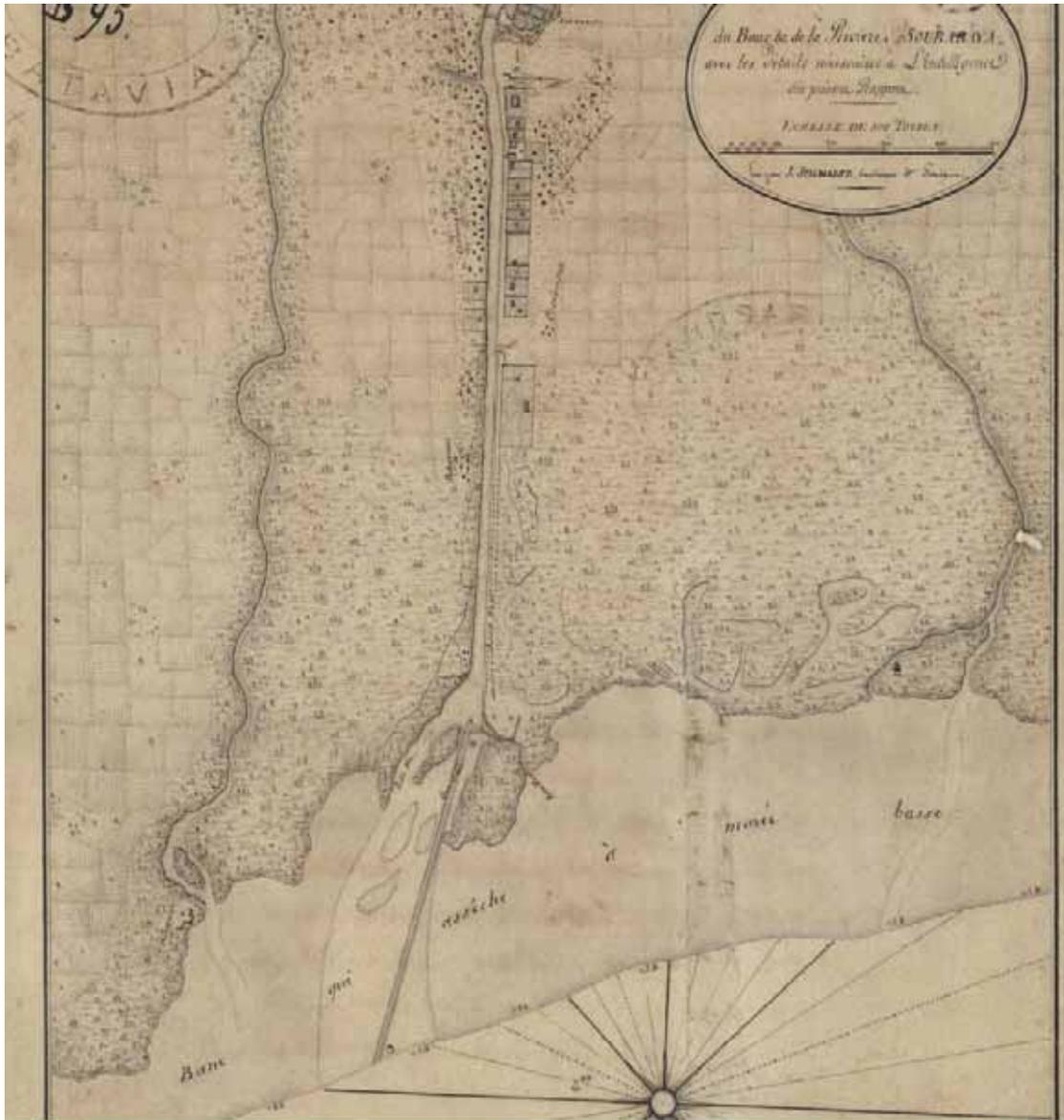


Surat dari Residen Timor kepada Yacio Baptista Viera Godinho, Wakil Kerajaan Portugis di Timor tentang kerjasama patrol dan proteksi jalur perdagangan di Timor dari gangguan para perampok, 5 Juli 1786.

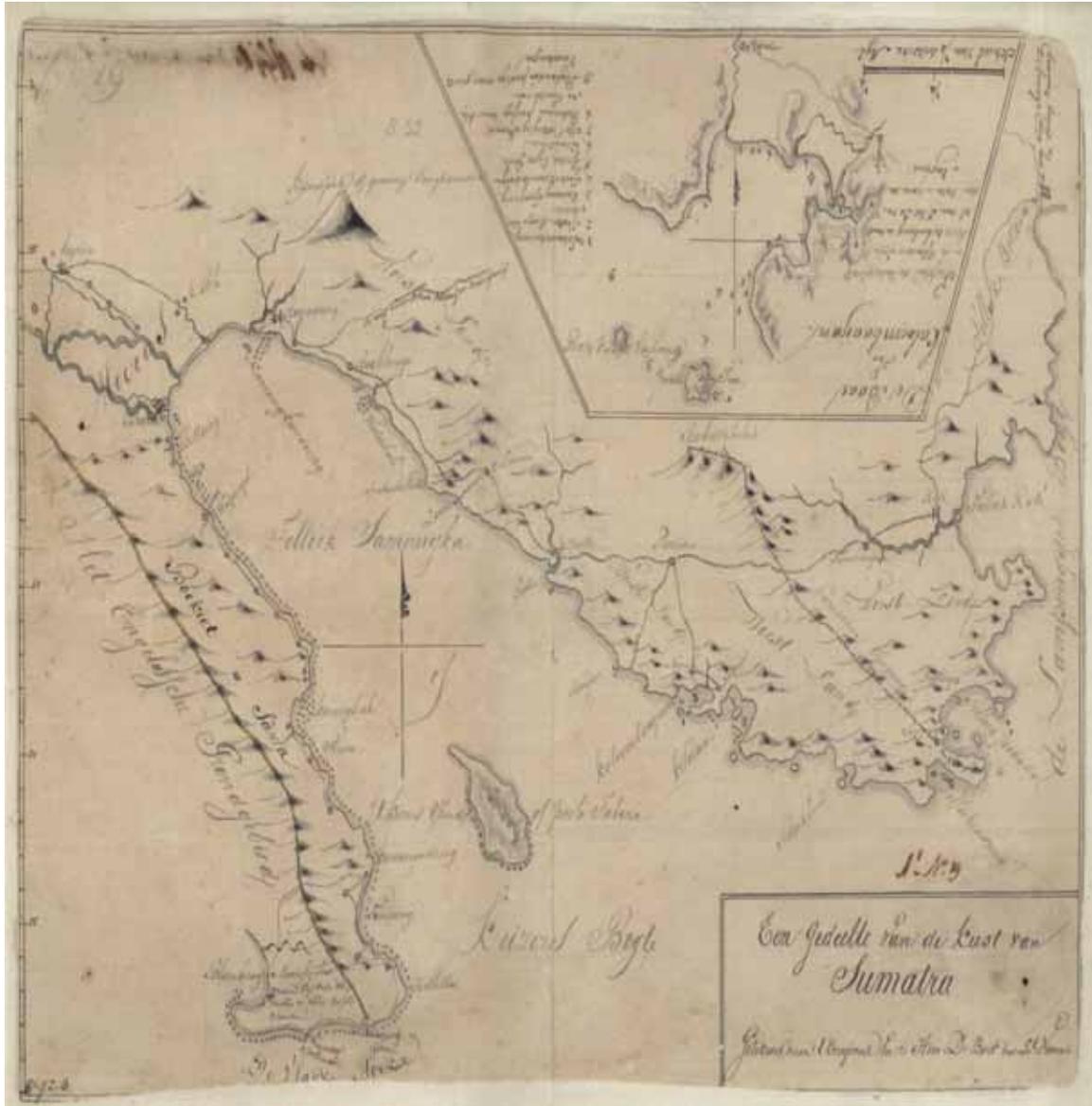
ANRI: Timor No.7



Laporan dari
Susuhunan
Pakubuwono kepada
Residen Gomes tentang
kekalahan prajurit
kompeni di daerah
pesisir Jawa, 4 Oktober
1799. (Dalam Bahasa
Jawa Kuno).
ANRI: Hoge Regering 3619



Peta topografis militer mengenai batas pinggir Sungai Surabaya 1801.
ANRI: Peta de Haan No. B 95



Peta pesisir Lampung (sebagian dari Pantai Sumatera bagian selatan) 1801.
ANRI: F. de Haan B.52

Kegiatan pengiriman hasil bumi yang laku di pasaran Eropa, seperti timah, lada putih dan hitam dari Pelabuhan Palembang, 1802.
ANRI, Palembang 41/17a

Samentrekking, van de in June 1802 van Palembang aangebrachte Thee, en Peper, te met S konings Vaartuigen, als met Hcomp. Bedems, met aantooning hoe veel ieder Vaartuig volgens aankuyring der Palembang, te bedienen, moest aanbrengen, en Wat deel, in alhier heeft voutgelovd, de N tegen 1256 guldens Nammentlyk.

| | in 1802 | in 1803 | in 1804 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| <i>Peper Witte</i> | 200 | 100 | 20 |
| <i>Thee Banca</i> | 100 | 100 | 100 |
| <i>Sald.</i> | 070 | 070 | 70 |

Die Transporthuis

Ambona den 22^{de} August 1817

Den Meester Commandant Engelhard op
Tegen van hier naar toe mate gelieve
Leu Informeren ik My naar van by de
Celle infanterie ik My by de, als dat op
gittener alhier van Tota presenten en een
partijder ingebreedt schip (commissie) met
beangende 150 Man boord en orisiel, en dat
dit schip van 100000 man door het schip
Bont Rovers, de Bont de Rovers, en
een ingebreedt Hollands schip, op een
gemaete van de schout lymagt Bont
de Rovers

En naar my door het tusschen
berigt als om alle binden en te worden
tot het aftenden van Tota na de
tot beklating van het Fort Wierden,
toe het van hier met de Bont de Rovers, en
aan liendigt detachement binnen twee
of drie dagen. Het waardt inder ope
tenden ten ahl een ander detachement van
Holland met de Bont de Rovers, en
vint Kapitein Bol, ik aan geboeven tot,
ander My ordert te vermenen en op boord

Van
Den Luit. Kol.
Groot

Surat dari Gubernur Maluku kepada Letnan Kolonel Groot mengenai jumlah personel yang ikut berperang dalam ekspedisi ke Ambon yang terdiri dari 1 (satu) Letnan Marinir, 16 (enam belas) kelasi Eropa, 1 (satu) murid/kadet kelas satu, 22 Agustus 1817.
ANRI: Ambon 998/L

Ech. 33. N. 1032 N^o 178 Kabint.
 Batavia den 14 May 1833
 Fructuaris
 J. v. B.

Het heeft Uwe Excellentie
 behaagd, mij by mondelinge opdracht
 om het ontzorgde gegraven
 kanaal in de Banyoemas
 op te nemen, en om te onder-
 zien of de westlyke straat
 tusschen de landen Java en
Nusaka Bambangang geschikt
 is, voor het in en uitvaren
 van schepen en groot dra-
 ghuur, hetwelk volgens
 Uwe Excellenties gesloten
 teidee opvangen van de on-
 standigheid of er al dan geen
 land-wind waait.

Ik, verzigt van den heer
Phuene, hebben ons den 14
 volge, naar de Banyoemas
 begeven, alwaar wij op den
 14 April zijn aangekomen.

Op den 30 April hebben wij
 ons van daar op reis begun-
 nen langs de rivier de Soraga,
 en heb ik de in Uwe Excel-
 lencie te rapporteren, dat
 het kanaal bovendien het in
 zage als volgt.

Aan
 Uwe Excellentie
 van Luitenant Generaal
 Gouverneur Generaal
 over
Nederlandsch Indië

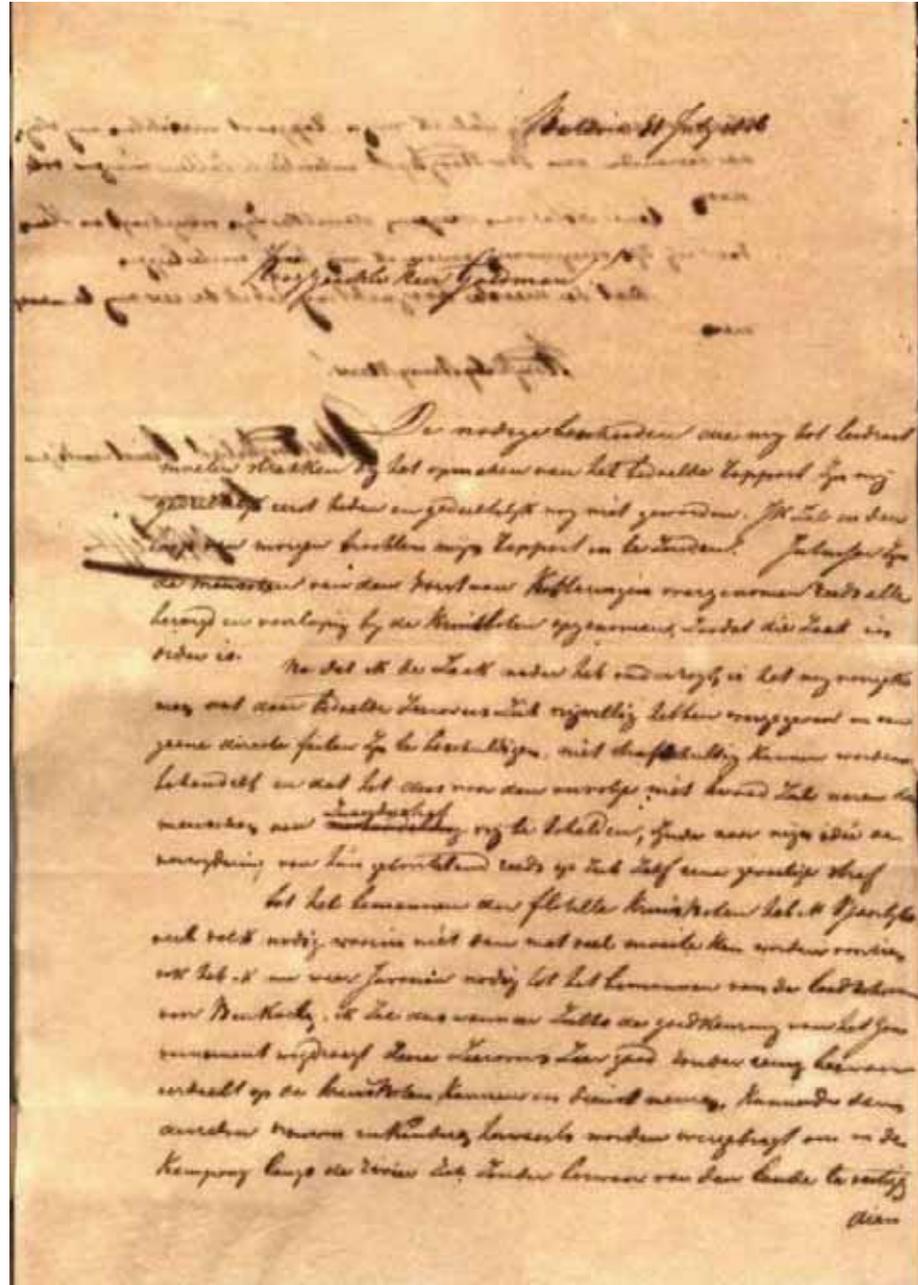
De

Laporan mengenai
 Kanal di Banyumas
 dan penelitian jalan
 di timur antara
 Pulau Jawa dan
 Nusakambangan
 yang cocok untuk
 masuk dan keluar
 kapal besar, 14 Mei
 1833.

ANRI: Banyumas 20/1

Bagian awal dari laporan perjalanan Sultan Kotawaringin, Pangeran Ratoe bersama Asisten Komisararis Bloem di Sambas antara lain tentang adanya gangguan keamanan laut di wilayah kekuasaan Kesultanan Kotawaringin, 31 Juli 1836.

ANRI: Borneo Zuid Oost No. 100/4



Rekening overzigt resident Landt van de West-Indië
 aan te Pontianak gedurende het jaar 1846

De getuige aan te Pontianak heeft bedragen:

| | | |
|---------------------|---------------|-----------|
| aan koopmanschappen | 288686 | 50 |
| aan specien | 270066 | 75 |
| <u>Totaal</u> | <u>558752</u> | <u>25</u> |

De inwendige bestaan in overblijfselen:

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| van <u>China en America</u> aan | 494895 | 20 |
| de rest van <u>Indië en Benganen</u> | 98283 | .. |
| <u>China, Malakka en de</u> | <u>287377</u> | <u>..</u> |
| en den <u>Ost-Indischen Archipel</u> | <u>357126</u> | <u>50</u> |
| <u>Totaal</u> | <u>1465681</u> | <u>30</u> |

De aan heeft plaats gehad aan de volgende landen:

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|
| van <u>Javaans eiland</u> | 277986 | 110 |
| den <u>Oost-Indischen Archipel</u> | 29073 | .. |
| <u>Celebes</u> | 13862 | .. |
| <u>China</u> | 83273 | .. |
| <u>Malakka</u> | 370028 | .. |
| <u>Totaal</u> | <u>468686</u> | <u>80</u> |

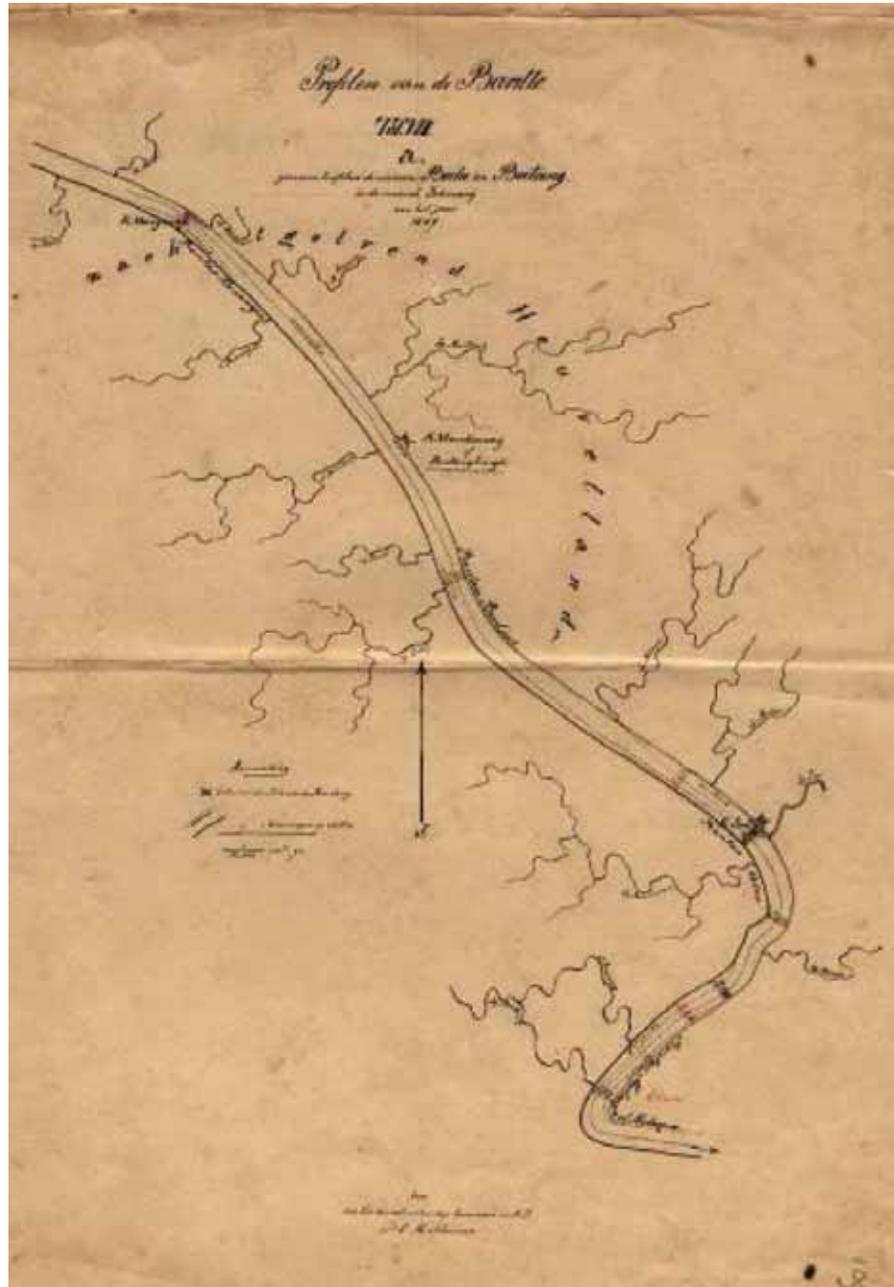
De overblijfselen van China en America en de rest van Indië en Benganen bestaan in de volgende landen:

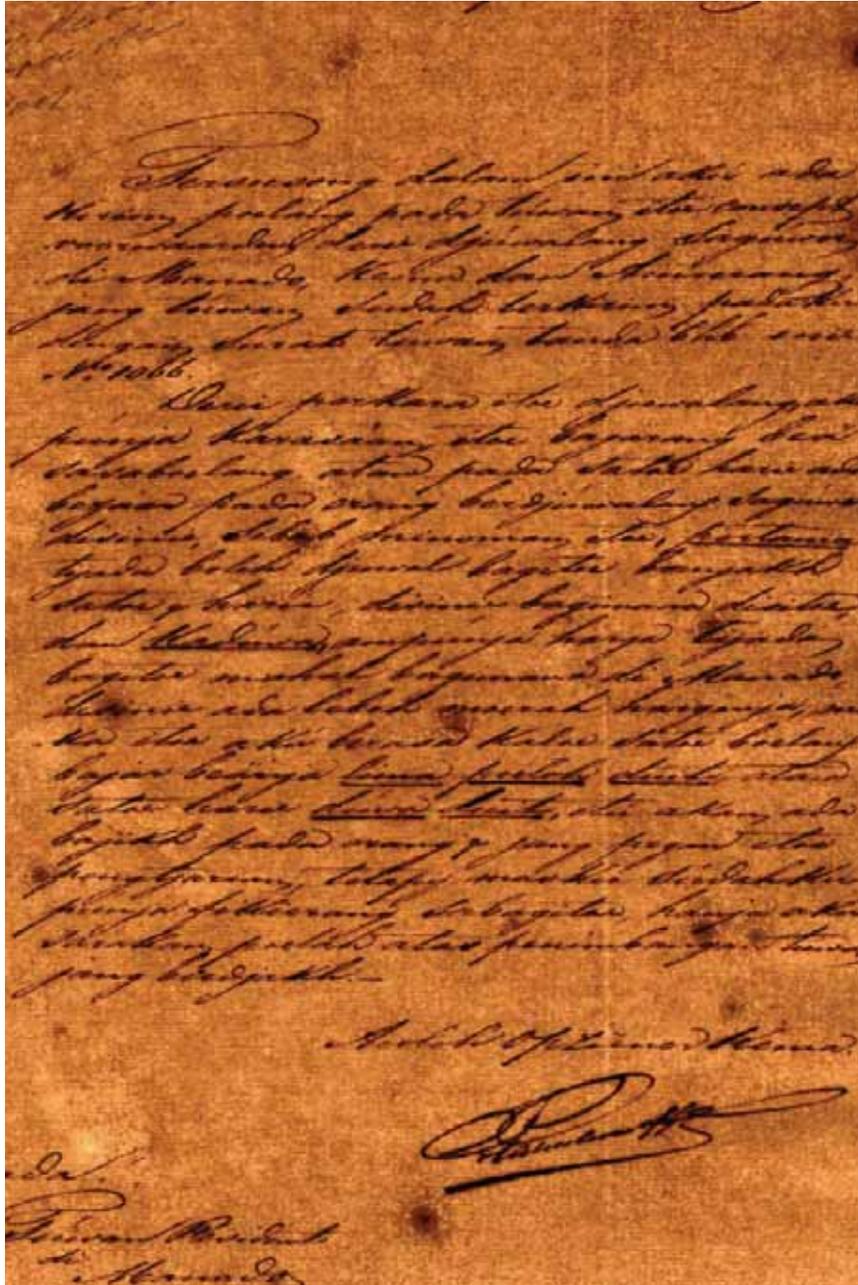
| | | |
|--------------------|-------|----|
| <u>Handwerk</u> | 2700 | 60 |
| <u>Garen</u> | 7000 | .. |
| <u>Glaswerk</u> | 2000 | .. |
| <u>Transporten</u> | 10000 | 80 |

Ringkasan tentang perdagangan dan pelayaran di Pontianak, 1846.
 ANRI: Borneo West No. 98

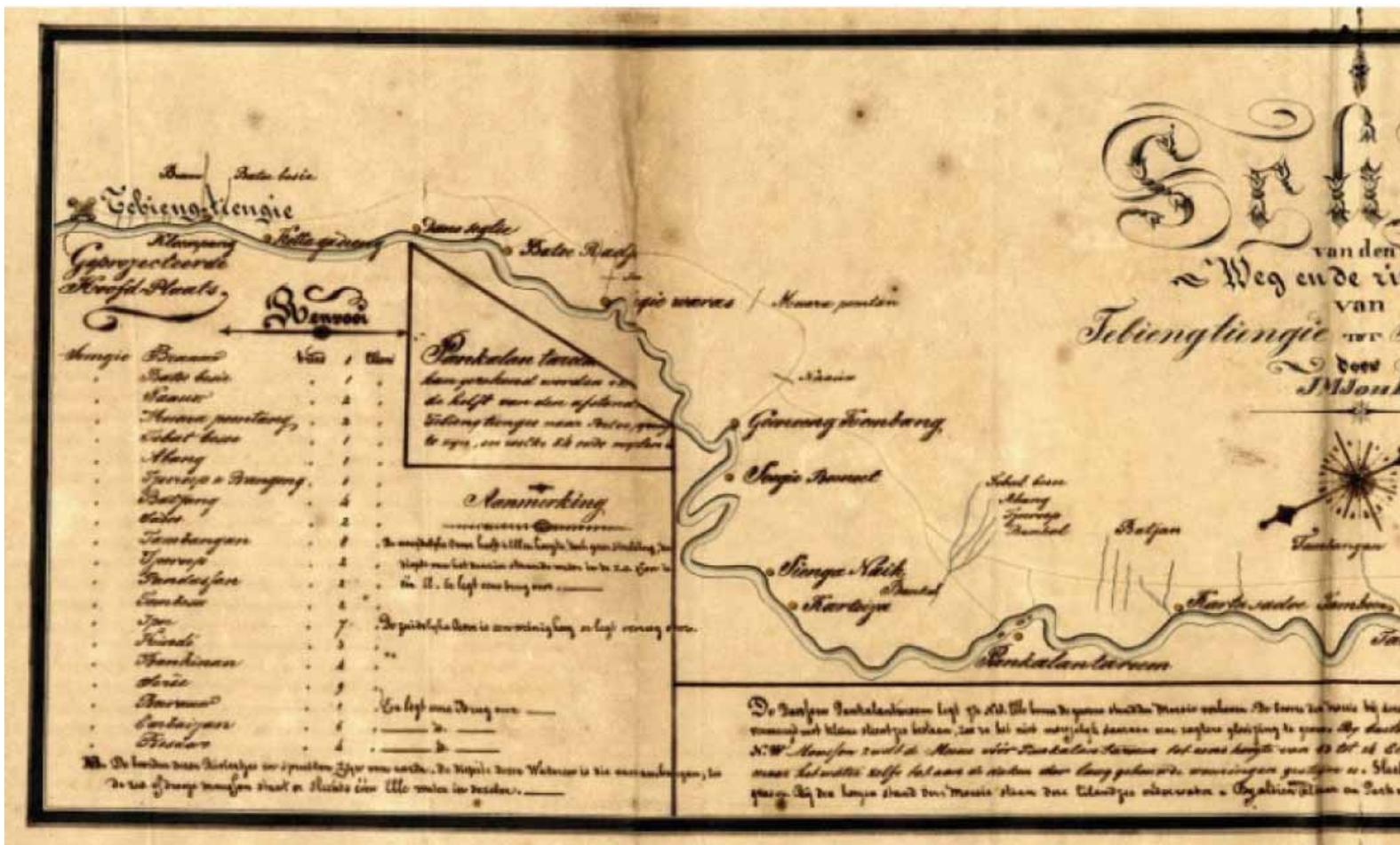
Peta hasil penelitian dan pemetaan dari Komisi Lingkungan Alam (Natuurkundige Commissie) yang menyatakan bahwa aliran Sungai Barito dapat dilalui kapal-kapal besar, 1847.

ANRI: Borneo Zuid Oost No. 122

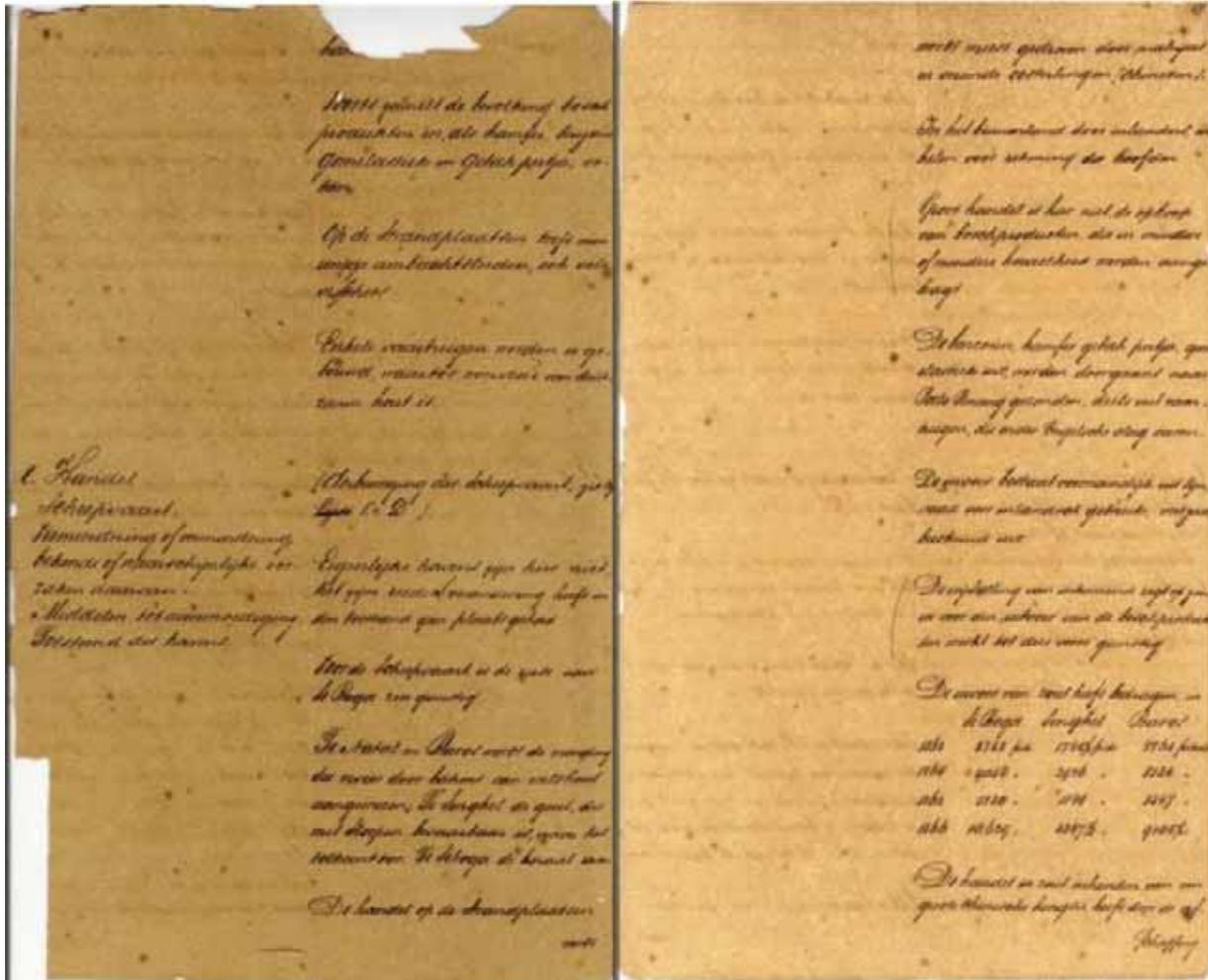




Surat dari pengawas (opziener) di Kema tentang pajak penjualan ikan yang dianggap terlalu besar yang bertentangan dengan aturan pajak penjualan yang ada, 10 Juli 1854.
ANRI: Menado No. 26



Gambaran tentang jaringan perjalan melalui sungai Musi dari Tebing Tinggi menuju Klingie. Pelayaran sungai ini melalui beberapa daerah.
 ANRI: Palembang No. 71-8



Natal, Baros, Sibolga, pelabuhan laut yang penting, termasuk dalam rute dagang Sumatra. Dari pelabuhan ini, hasil bumi diperdagangkan hingga ke Cina, 1866. ANRI, SWK 128/1

S: A
 By 1876 Kort Overzicht van de Handel
 in de Scheepvaart te Banda
 van de maand December 1876.

De waarde van de import te
 Banda best bestaande f 81.600.
 in Welken f 102.400.

De import had oorspronkelijk plaats
 van Batavia 1000 . 22.200 .
 Singapore 1000 . 1000 .
 Macassar 1000 . 14.100 .
 Amboina 1000 . 24.100 .
 Samarang 1000 . 110 .
 Banca 1000 . 100 .
 Paph 1000 . 1.000 .
 Sumbata 1000 . 500 .
 Minado 1000 . 100 .

Totaal / 102.400 .

De import oorspronkelijk
 van Rotterdam 1000 . 22.200 .
 Singapore 1000 . 14.100 .
 Macassar 1000 . 22.200 .
 Samarang 1000 . 2.677 .00 .
 Nethy 1000 . 512 .
 Amboina 1000 . 2000 .

Totaal / 102.400 .

De import oorspronkelijk bestaande
 van de bestaande uit.

Aardina 1000

Ikhtisar ringkas mengenai perdagangan dan pelayaran di Banda selama bulan, Desember 1876.
 ANRI: Ambon 1077

12-563

Pescudon 16 Nov 1889

(1 1/2 R. Kl.)
 Koning Koning te
 Sumatra
 2 1/2 M. Storms
 (Muntok) -

Ik heb de Eer U Ed. G. te
 bevelen te verpacten met u
 een vorderbenden bodem
 op ontworpen dyes naar her
 waart te willen opkomen en
 de opening dat het mij
 aangenaam zoude zijn in
 het belang der zaken indien
 U Ed. G. de weg mogelijk
 naar door Straat Brahallo
 binnen door zee dert mogelijk
 langs de kusten van Sjambi
 Reteh tot Indragirie tot aan
 Tandjong Bakauw over
 van dan naar herwaart om
 te steken. Gedachte van
 tuis op die hoogte ontbrant
 zelden bij de minst. verzien
 heid ontbrant de deugdzaam
 heid hunner papier. diens
 aangehouden te werden en
 naar Pescud opzigt.

D. R. R.

Surat dari Riau tentang lalu lintas pelayaran yang padat melalui Selat Brahallo, sepanjang Pantai Jambi, Reteh Indragirie sampai Tandjong Bakauw, 16 November 1889 .
 ANRI: Riouw 27-10

13

2510502
/ 36

Betreffende het sluiten van
nieuwe politieke contracten
met Bolang, Mouputo
en de overige Landschap-
pen ter Noordkust van
Celebes (Menado)

Ter voldoening van de
met betrekking tot de in
marginen bedoelde aan-
gelykheid zijde mijnes
van den 14^{ten} van 6 Augustus
1893 no. 1775 en 14 Juli
j. l. no. 1739 aan den Resi-
dent van Menado ver-
stelde opdrachten, ver-
wijst de Resident in zijn
inlijgend ^{in lijn} paragraaf 5 naar
zijn brieven van 20
Juli en 20 September 1893
No. 1739 en 17, beide gesamen-
houdende voorstellen tot
vaststelling van een nieuw
maatschappelijk contract
voor de Zulandse rijksoverheid
aan de Koast van Tomini
en ter Noordkust van Ce-
lebes en tot overtoetsing
der overeenkomstigheden
in het gewest onder zijn
beheer ten behoeve van
de verhoudingen met die
rijks...

Wenits deze brieven
met het betrekkelijk adres
van den Heer H. O. Gallier,
ken

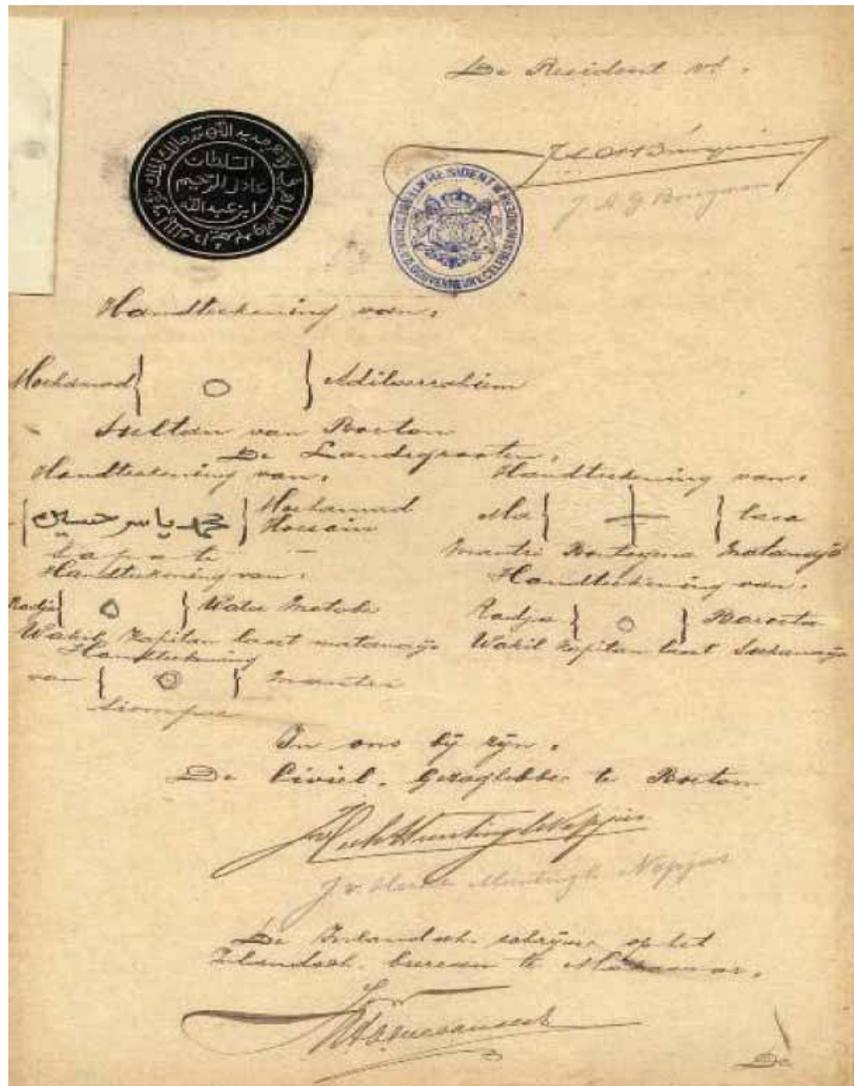
De Raadslid,

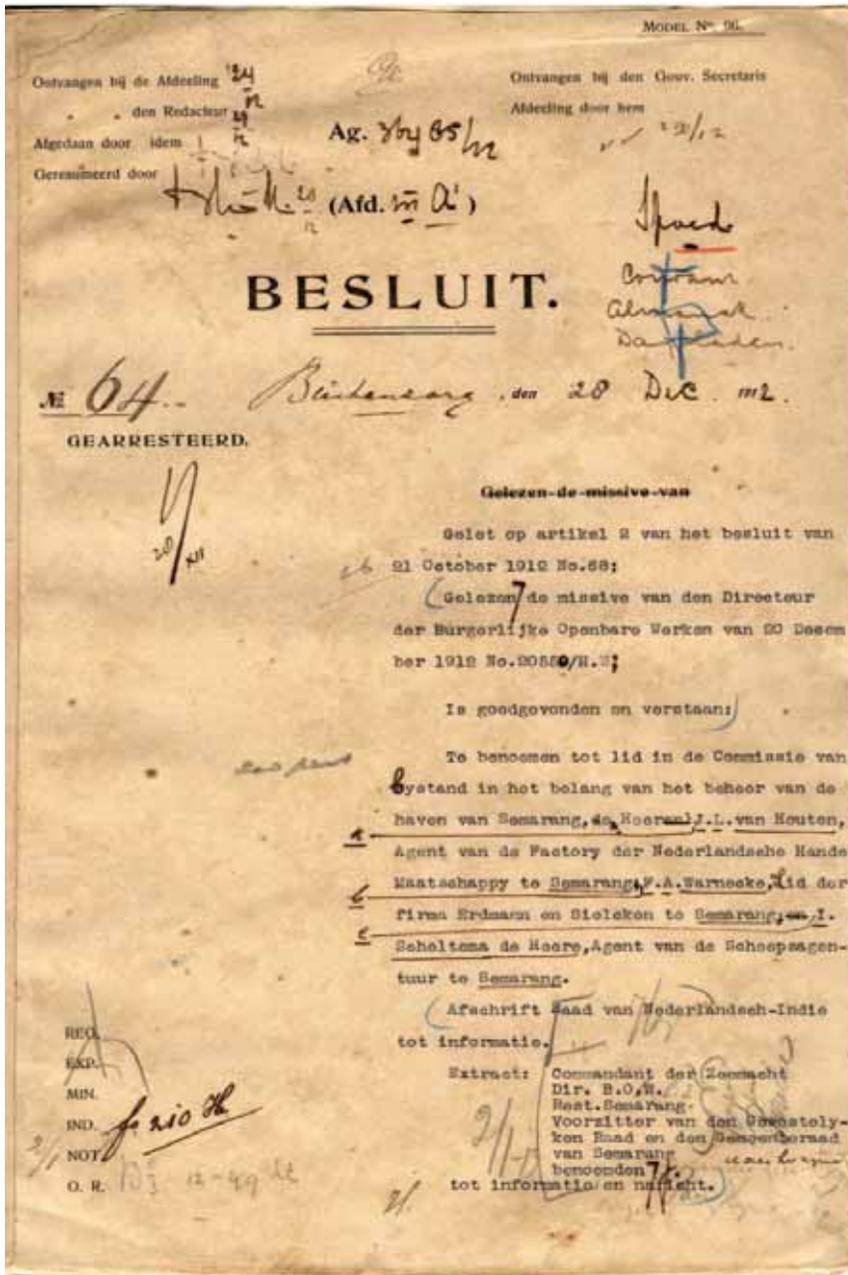
1893

Surat Sekretaris
Gubernur tentang
penetapan Poso
sebagailalu lintas
perdagangan yang
penting di daerah
Teluk Tomidan
Bwool/Buol sebagai
tempat singgah
di pantai utara
Sulawesi.

ANRI: Besluit 13 Juli 1893
no. 15 (MGS 13 Juli 1893
no. 1775a)

Bagian akhir kontrak perjanjian antara J.A.G. Brugman Resident Celebes dan wilayah kekuasaannya dengan Moehamad Adiloerrahiem pelaksana pemerintahan Buton tentang penyerahan ganti rugi penarikan pajak dan cukai barang-barang ekspor di Pelabuhan Buton, 24 September 1907. ANRI: Besluit 25 Januari 1907 No. 26 (Kontrak Celebes A/9)





Surat Keputusan tanggal (Besluit) 28 Desember 1912 No. 64 tentang pengangkatan anggota komisi dari pimpinan Pelabuhan Semarang.
 ANRI: *Algemeene Secretarie, Besluit 28 Desember 1912 No.64*

| Residentie of afdeling | No. van de afdeeling | Naam van de gisterenverrezen | Datum en nummer van het overnamingsbesluit. | Datum der betreding. | Naam der verzamelende gezin. | Kinderen | | Totaal aantal | Opmerkingen. |
|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Naam | leeftijd | | |
| Semarang. | 1. | Ederissen | 4 Februari 1927 No. 12. | 16 Februari 1927 | Kochajoh | - | - | 2 | |
| | 2. | Abdoelrahman A. | Idem | Idem | Soejati | - | - | 2 | |
| | 3. | Has Soegiri | Idem | Idem | - | - | - | 1 | |
| | 4. | Soekindar | Idem | Idem | Soekindah Soestijah | Soekindah Soestijah | 5 jaar 4 jaar | 4 | |
| | 5. | Saleh | Idem | Idem | Soleand | - | - | 2 | |
| | 6. | Soesatri | Idem | Idem | Soesatri | - | - | 2 | |
| | 7. | Fraps | Idem | Idem | Djoekah | Hijetah | 6 jaar | 2 | |
| | 8. | Djestan | Idem | Idem | - | - | - | 1 | |
| | 9. | T.E. Soerodjo | Idem | Idem | Sri Soekah | - | - | 2 | |
| | 10. | Soesero | Idem | Idem | Soerikah | Soetjah Soet | 5½ jaar 4 jaar | 4 | |
| | 11. | Mohand Ali | Idem | Idem | Soesatri | Soerirja Soerirah | 6 jaar 1½ jaar | 4 | |
| | 12. | Soemo s.t. | Idem | Idem | Soesatri | - | - | 2 | |
| | 13. | Sastrosoegro | Idem | Idem | Silarti | Soeljah Soelife Purnoto | 6 jaar 3 jaar 2 maanden | 5 | |
| | 14. | Soekindar | Idem | 17 Februari 1927 | - | - | - | 1 | |
| | 15. | Bradjat | Idem | 16 Februari 1927 | Tijah | - | - | 2 | |
| | 16. | Harlan & Harlote | Idem | Idem | In | Soeljah Soeljah Soeljah Soeljah | 9 jaar 5 jaar 4 jaar 3 jaar 2 jaar | 7 | |
| | 17. | Hartadi | Idem | Idem | Soedjini | Sardi | 45 dagen | 2 | |

Daftar orang-orang yang dikirim ke Boven Digoel dari Semarang yang diangkut dengan kapal H.M Kruisser "Java", 12 Maret 1927.

ANRI: *Boven Digoel no. 200*

Surat dari
a.n. Direktur
Binnenlands
Bestuur, v/d Het
Hoofd der Afdeeling
Bestuurszaken der
Buitengewesten,
Hamerster kepada
Direktur Burgerlijke
Openbare
Werken tentang
penunjukkan Jambi
sebagai perusahaan
Pelabuhan dan
penentuan batas
daerah pelabuhan,
5 September 1928.
*ANRI: Binnenlands
Bestuur No.1223*

DEPARTEMENT VAN
BINNENLANDSCH BESTUUR.

No. Bg 22/1/21

BILAGEN:
6

WELTEVREDEN, 5 September 1928.

124619
28

ONDERWERP:
Aanwijzing van Djanbi als bedrijfshaven en
vaststelling van de grenzen van het haven-
gebied aldaar.

Met terugzicht l.l. op de deszrijdsche dienstnota van 12 Juni j.l. No. Bg 22/1/12, waarbij een afschrift van mijn aan den Resident van Djambi gericht schrijven van 14 Mei j.l. No. Bg 22/1/8 werd overgelagd, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge thans een afschrift aan te bieden van het op dat schrijven van den heer Eserman ontvangen antwoord van 31 Juli j.l. No. 4825/9, met de bijlagen daarvan, gedeeltelijk in het oorspronkelijke.

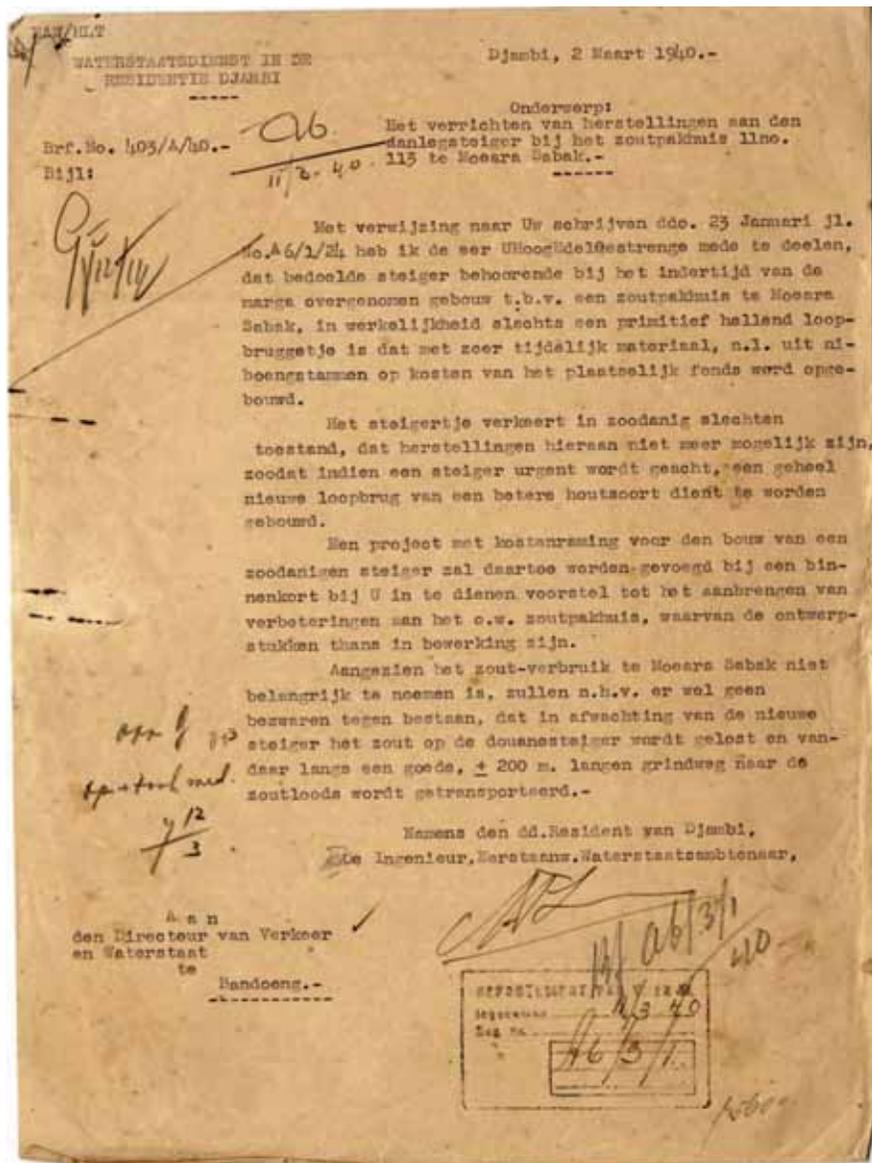
Gevolg gevende aan het voorkomende in de laatste zinrede van dien brief van den heer Eserman, neem ik de vrijheid de stukken wederom in Uwe handen te stellen, teneinde UHoogEdelGestrenge de gelegenheid te geven, eene wijziging der voorgestelde havengrenzen te overwegen in den geest als door den Resident aangegeven.

De Directeur van Binnenlandsch Bestuur,
Voor dezen:
Het Hoofd der Afdeeling
Bestuurszaken der Buitengewesten,
Hamerster.

Aan
den Directeur der Burgerlijke
Openbare Werken.

Surat dari a.n. Residen
 Jambi, de Ingeniur,
 Eerstaanw. Waterstaat
 Ambtenaar kepada
 Direktur Verkeer en
 Waterstaat tentang
 pelaksanaaan pekerjaan
 perbaikan tempat
 menurunkan kargo
 pada sebuah gudang
 penyimpanan garam di
 Muara Sabak, disertai
 dengan peta lokasi,
 2 Maret 1940.

ANRI: BOW No. AX/10



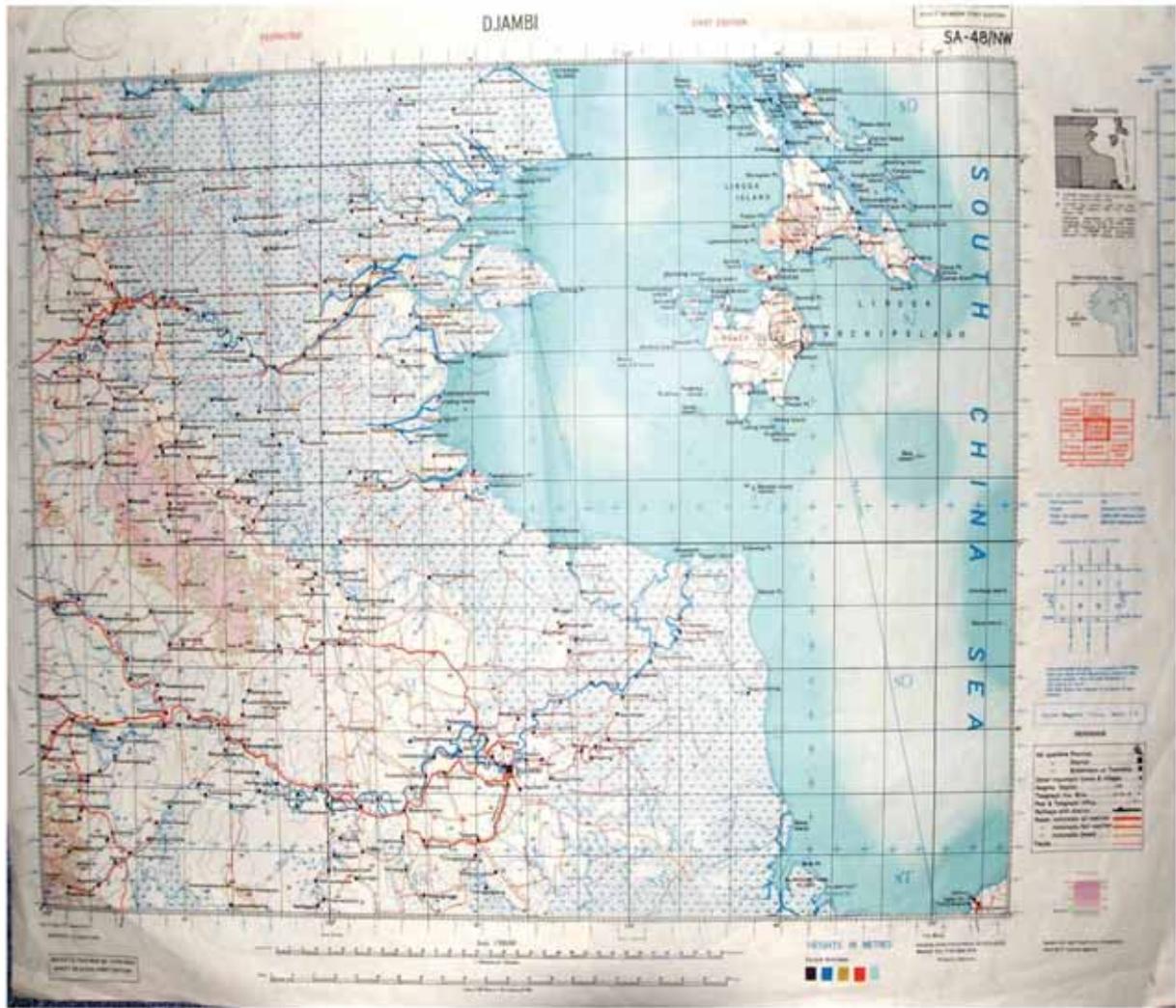
Sumber selanjutnya:

1. Laporan mengenai kanal di Banyumas dan penelitian jalan di timur antara Pulau Jawa dan Nusakambangan yang cocok untuk masuk dan keluar kapal besar, 14 Mei 1833.
ANRI: Banyumas 20/1
2. Laporan Residen Timor kepada Gubernur Jenderal tentang Kondisi sungai dan transportasi air di pedalaman Kupang, Nusa Tenggara Timur, 1834.
ANRI: Timor No.68
3. Laporan tentang perdagangan dan pelayaran yang dilakukan di Pontianak selama tahun 1846.
ANRI: Borneo West No. 98
4. Surat Keputusan tanggal 28 Desember 1912 No. 64 tentang pengangkatan anggota Komisi Pembantu untuk Kepentingan Pimpinan Pelabuhan Semarang.
ANRI: Besluit 28 Desember 1912 No. 64
5. Usulan penentuan perbatasan untuk kepentingan sekitar pelabuhan (Pelabuhan Ratu), disertai peta situasi Pelabuhan Ratu dan Teluk Wijnkoop, 1925.
ANRI: Binnenland Bestuur No. 1363

Pasca Kemerdekaan

Potensi laut dapat dijadikan sebagai sarana dalam suksesnya perekonomian dan ketahanan politik suatu negara. Pasca kemerdekaan, Indonesia mengembangkan potensi kelautannya. Sebagai negara yang menyandang predikat Negara Maritim atau negara kepulauan yang dalam membangun perekonomiannya dicapai melalui sifat maritim yaitu terciptanya aktifitas pelayaran yang tinggi di wilayah Indonesia. Persepsi kelautan yang menjadikan laut sebagai tali kehidupan dalam arti pentingnya maritim bagi pembangunan perekonomian Indonesia di dalam upaya mengisi kemerdekaannya. Laut Indonesia merupakan urat nadi perekonomian nasional dan penggerak lalulintas ekonomi dengan wilayah manca negara.





Peta jalur telekomunikasi dan transportasi wilayah Jambi. Tahun 1948.
ANRI Dinas Topografi No. 5/27/SA-48/NM

SLO 0121 SD PAKABARGE SD = KANTOR DELEGASI
611 175/166 5 15.0 PERUNDINGAN INDONESIA BELANDA
JOGJAKARTA =

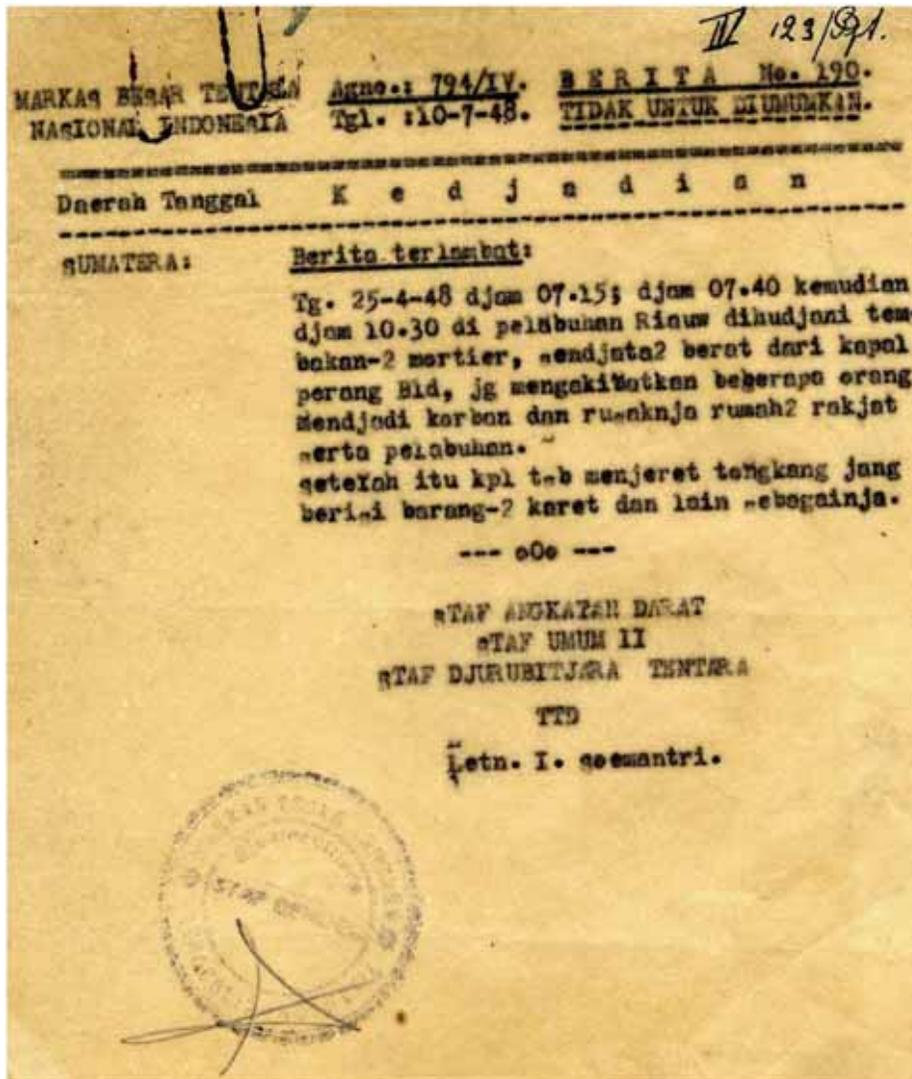
Raja no 57/Del.
R II/11/23
2-2-23
Indragiri
26/7

NO 261/DPD/ R MENURUT LAPURAN DARI KETERANGAN BENGKALIS TGL 20/6-48
DJAM 14:05 SBH KPL MSH DJENIS RR DATANG DARI TANDJUNGSAMAK MASUK KEPER-
AIRAN KITA SELPANDJANG MENUDJU KEARAH TANDJUNGGONGKONG KOMA SESAMPAINJA
DIDUKA PERTAHANAN KITA SELPANDJANG KPL TSB MEMERIKSA SBH TONGKANG DAN DI-
LEPASKANNJA KEMBALI KOMA DJARAK DARI PANTAI SELPANDJANG LK 70 METER TTK
TGL 22/6-48 DJAM 01.00 SBH KPL MSH DJENIS RR DATANG DARI TANDJUNGGONG-
KONG DAN MENDAR MANDIR DIDUKA SELPANDJANG 3 KALI KOMA KEMUDIAN KPL TSB
BEBERAPA KEMBALI KEARAH TANDJUNGGONGKONG KOMA DJARAK DARI PANTAI LK 20
METER TTK TGL 22/6-48 DJAM 08.10 SEBUAH KAPAL TERBANG DATANG DARI TIMUR-
LAUT MENUDJU KEARATLAUT KOMA TINGGINJA LK 3000 MT TTK DJAM 09.10 SEBUAH
KAPAL MESH DJENIS RR DATANG DARI TANDJUNGGONGKONG MENUDJU KEARAH TAN-
DJUNGSAMAK KOMA SESAMPAINJA DIDUKA SELPANDJANG KPL TSB MEMERIKSA SBH TONG-
KANG TONGKONG KEMUDIAN DILEPASKANNJA KOMA DJARAK DARI PANTAI LK 1000 METER
TTK DJAM 13.10 KPL RR TSB BEBERAPA KEMBALI KEARAH TANDJUNGGONGKONG KOMA
DJARAK DARI PANTAI LK 700 METER TTK TITIK MENDAR TIDAK ADA HABTTK

DPD RIAU
6-7- 23.20

Telegram dari Dewan Perwakilan Daerah Riau kepada Kantor Delegasi Perundingan Indonesia-Belanda di Yogyakarta tentang agresi sebuah kapal yang datang dari Tanjung Samak masuk ke perairan menuju Tanjung Kongkong, Kepulauan Riau. 6 Juli 1948.

ANRI: Delegasi Indonesia 551



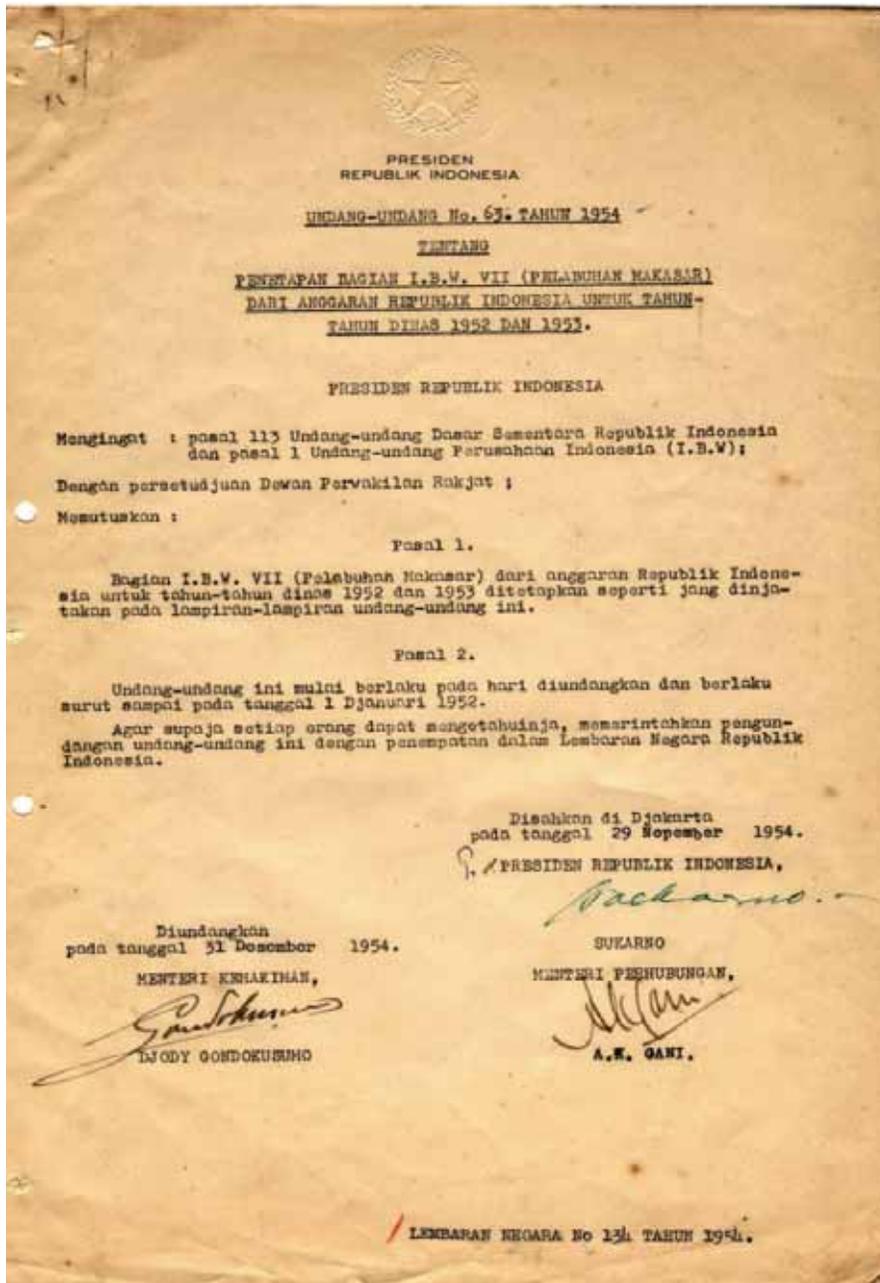
Laporan Staf Umum II Markas Besar Tentara Nasional Indonesia tentang penyerangan terhadap pelabuhan Riau yang dihujani tembakan-tembakan mortier dan senjata-senjata berat dari kapal perang Belanda, 10 Juli 1948.

ANRI: Delegasi Indonesia 552



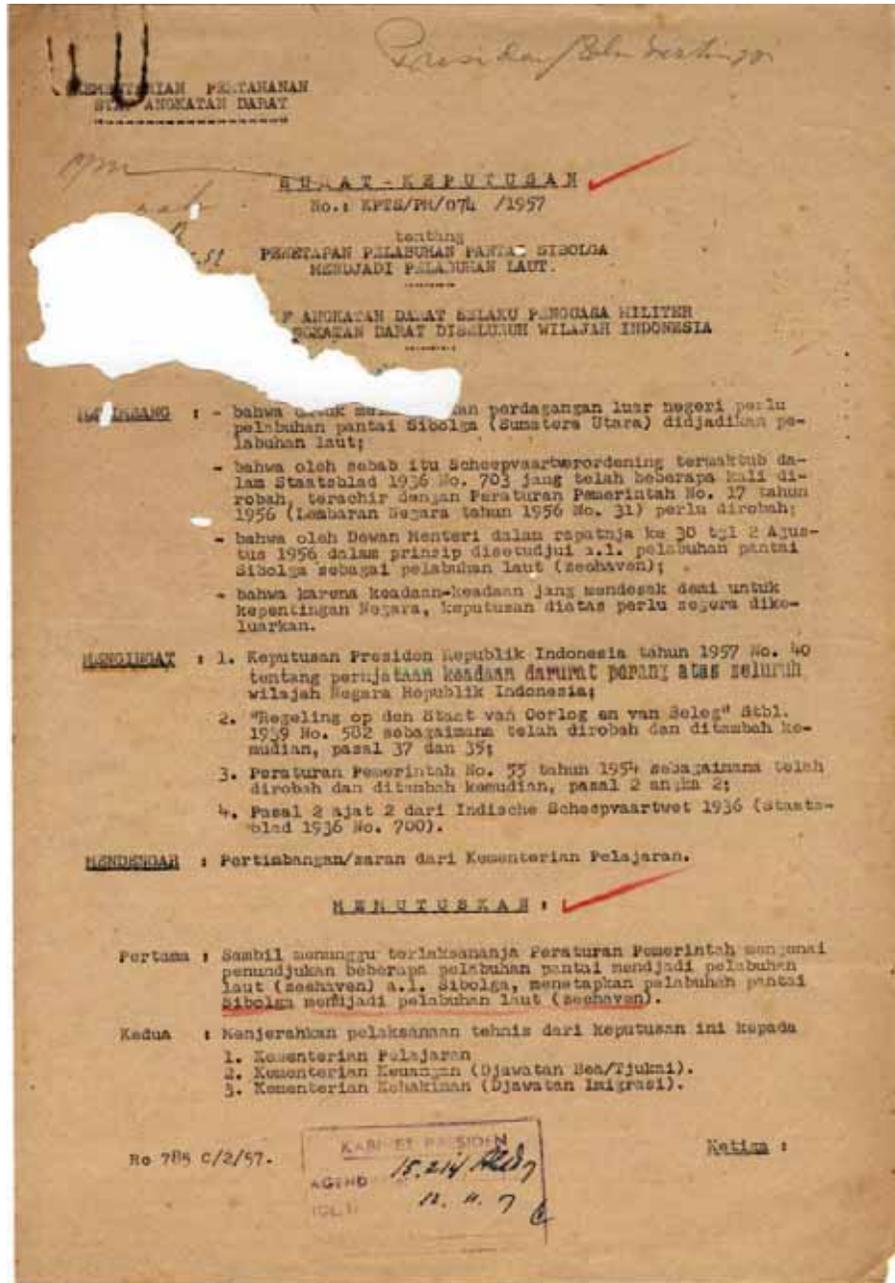
Rumah-rumah penduduk di tepi pantai Pulau Penyengat, Kepulauan Riau,
5 Agustus 1951.

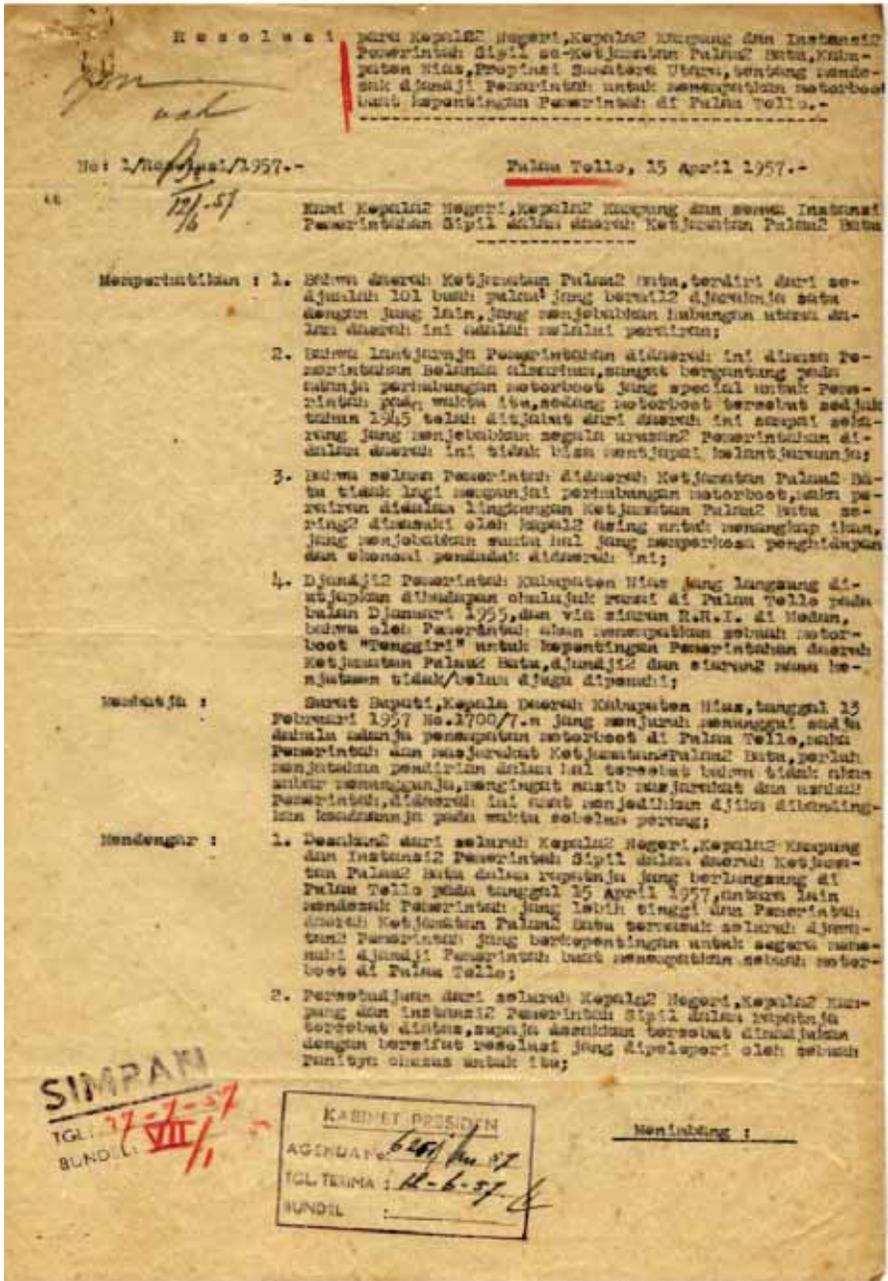
ANRI: Kempen K 510805 EE 28



Undang-Undang Nomor 63 tahun 1954 tentang Penetapan Bagian Indische Bedrijven Wet (IBW/ Peraturan Perusahaan Indonesia) Pelabuhan Makassar dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953, 29 November 1954. *ANRI: Lembaran Negara No. 134 Tahun 1954.*

Surat Keputusan
Kepala Staf Angkatan
Darat selaku
Penguasa Militer
tentang penetapan
Pelabuhan Pantai
Sibolga menjadi
Pelabuhan Laut
(Zeehaven). 12
Nopember 1957.
*ANRI: Kabinet Presiden RI
No. 2100*





Resolusi dari Panitia Penempatan Motorboot Pemerintah di P. Tollo tentang desakan kepada pemerintah daerah SUMUT agar menempatkan motorboot untuk kepentingan pemerintah di P. Tollo. 15 April 1957. ANRI: Kabinet Presiden RI No. 2242

Sumber selanjutnya:

1. Undang-undang Nomor 63 tahun 1954 tentang Penetapan Bagian Indische Bedrijven Wet (IBW) atau Peraturan Perusahaan Indonesia Pelabuhan Makassar dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953, 29 November 1954 .
ANRI: Setkab UU No. 156
2. Memorandum melalui menteri perdagangan kepada Menteri Perhubungan 15 Januari 1969, untuk melakukan penutupan 16 pelabuhan laut di sepanjang perbatasan tersebut. Sementara beberapa pelabuhan masih dibuka untuk persyaratan ekspor dengan transshipment di Singapura tetapi dengan persyaratan khusus.
ANRI: Setkab 320
3. Foto Presiden Soekarno menandatangani naskah peringatan pertama masuknya Kapal Jadayat di Pelabuhan Samudra Bitung di Manado, 15 Juli 1954.
ANRI: Kempen 540715 TT 50
4. Surat Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan – perusahaan Tambang Umum Negara tentang perbaikan Pelabuhan Kajang. 11 Agustus 1961.
ANRI: Aneka Tambang 74



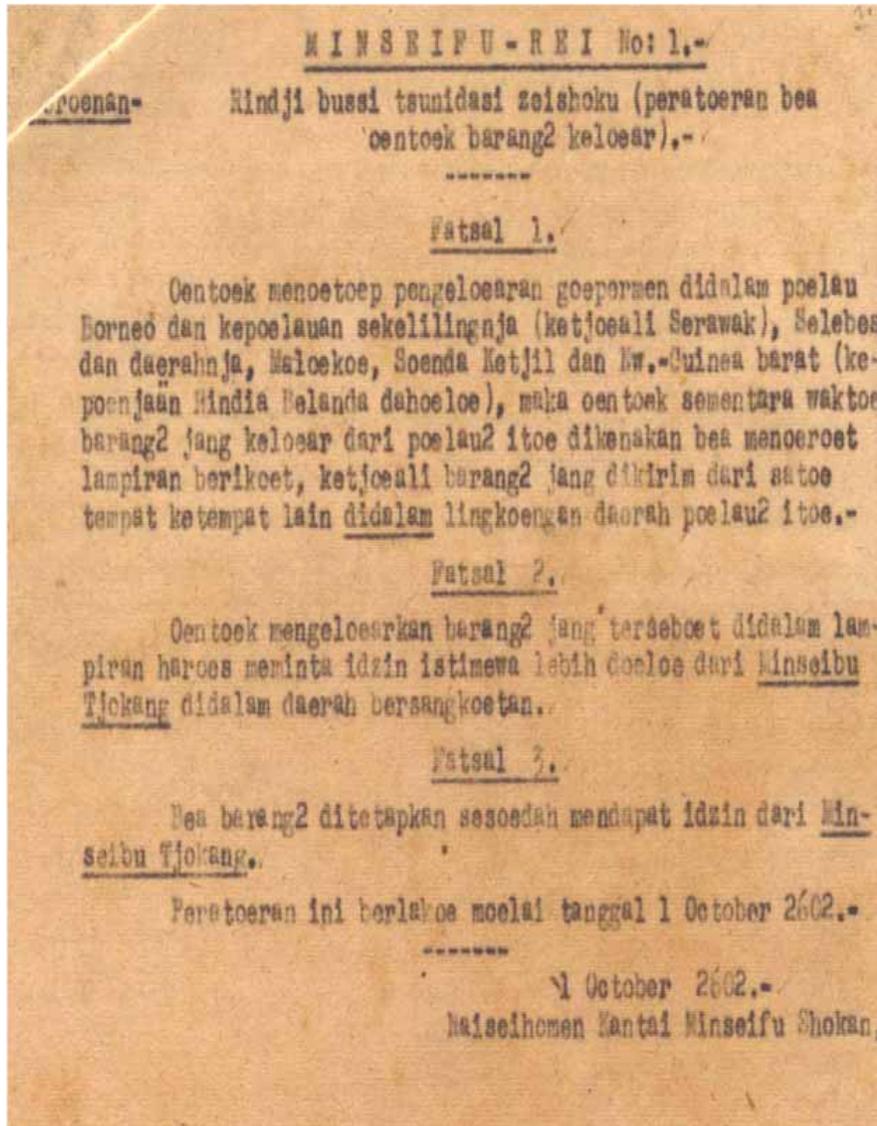
Pelabuhan Dagang dan Pelabuhan Perikanan

Kawasan Laut Jawa merupakan kawasan jantung perdagangan laut kepulauan Indonesia. Kawasan Laut Jawa telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya Bangsa Barat. Batasan geografis, seperti peranan kota-kota pantai yang ada di sekitar selat Madura, yaitu Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Besuki, Bondowoso, Panarukan, Banyuwangi, Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan.

Letak Makassar yang jauh dari daratan Asia, namun dapat berjaya melalui perdagangan yang telah memberi penghidupan pada penduduknya, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh arus barang yang lewat pelabuhan atau sebagai buruh pada saudagar-saudagar maupun sebagai pelaut yang bekerja pada pemilik kapal.

Dari sekian banyak route pelayaran dan perdagangan di perairan Nusantara, route pelayaran dan perdagangan yang melintasi Laut Jawa merupakan route yang paling ramai. Laut Jawa bearada di tengah Kepulauan Indonesia dan sangat cocok untuk pelayaran dan perdagangan serta strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia anatar Malaka-Jawa dan Maluku.

Banyaknya bandar dan pelabuhan besar di Indonesia, membuktikan akan besarnya peran kehidupan kemaritiman Indonesia sejak masa lampau ketika berdatangan bangsa-bangsa barat yang berekspansi di nusantara dalam aktifitas pelayaran, tidak saja dalam kepentingan perekonomian semata, tetapi memanfaatkan potensi laut sebagai penghubung segala aktifitasnya pada perjalanannya di masa itu.



Bagian awal dari Peraturan tentang bea pengiriman barang-barang keluar dari pulau Borneo, Celebes, Maluku, Sunda Kecil dan New Guinea Barat, 1942.

ANRI: Kerajaan Bima No.M40



Gajih Ikan Paus dijemur dipanas matahari kemudian ditampung dan dipakai sebagai bahan bakar di Lamalerap, Nusa Tenggara Timur, 22 September 1948.

ANRI: Rvd 80922 NN 32



Penangkapan Ikan paus secara beramai-ramai oleh penduduk di Muara Pantai Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, 23 Oktober 1954.

ANRI: Kempen 541023 NN 1

UNDANG-UNDANG No. 1 / 1950.

TENTANG PERLINDUNGAN SUPLEMENAT DI DAERAH YANG DIPERHIMPUNKAN
MELAKUKAN SUPLEMENAT MILITER.

Menimbang, bahwa barang-barang keperluan sehari-hari dan barang-barang tekstil yang bahan pembuatannya telah dikeluarkan dari Pulau Weh;

Menimbang lagi, bahwa penduduk Pulau Weh pada masa ini semakin bertambah dengan barang-barang yang didatangkan dari Medan dan Djohor Bahru dan berhubung dengan kedudukan ini, maka timbul kebutuhan barang-barang tersebut dipulau ini dan mengakibatkan kekurangan barang-barang ini;

Membaca surat keast J.M. Hendard Gerson Jalan Hegeri N.1.6. tertanggal 6 Maret 1950 No. 82/3/1950;

Mengingatlah undang-undang berikut:

- a. pasal 17 dan 40 dari peraturan Negara dibidang kesehatan darurat perang (Reglement op de Staat van Oorlog en Beland) yang tercantum didalam hukumundang Negara Indonesia (Staatsblad van Indonesia) tahun 1937 No. 282;
- b. pasal 112 dari peraturan perundangan-peraturan Negara yang dirubahkan pada tahun dan tercantum didalam hukumundang Negara Indonesia tahun 1940 No. 77 dan tercantum didalam tahun 1945 No. 146;
- c. ayat 1 dari ketentuan Lethin Gubernur Djohor Bahru yang diundurkan tertanggal 29 Desember 1946 No. 10 (Hukumundang Negara-Indonesia tahun 1946 No. 13), dan
- d. pasal 192 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat;

MEMUTAKAN PERATURAN BERIKUT BERIKUT:

FATWA 1. Selain dari pada untuk keperluan sendiri, dilarang:

- a. memasok barang-barang keperluan sehari-hari yang termasuk pada pasal 1 dari peraturan ini dan barang-barang tekstil, termasuk bahan tekstil re'gat, dari Pulau Weh ke luar Pulau Weh;
- b. mengangkut barang-barang yang termasuk dalam ayat a., dari kota Selang ke tempat lain dipulau Weh;

FATWA 2. Larangan yang tersebut pada pasal 1 tidak berlaku untuk barang-barang keperluan tertentu;

FATWA 3. Barang-barang keperluan sehari-hari yang dimaksudkan didalam peraturan ini ialah:

1. susu (bental dan keju) didalam botol,
2. gula pasir,
3. mentega,
4. margarine,
5. tepung,
6. rokok,
7. kardus kopi,
8. beras, dan
9. invarium.

FATWA 4. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1950.

KABINET PRESIDEN

AGENDA No. 1671 dan 16

TGL TERIMA : 04. 4. 50

BUNDEL : 18 a

7 Maret 1950.

Gibran Satrio, Sekretaris Kasatrikot yang diperbantukan pada Kasatrikot Militer tersebut,

(Doris Wiharjo),

SIMPAN

TGL: 04. 4. 50

BUNDEL: 18 a

KEMAH SIKEMAH

Pulau Weh sejak dulu terkenal sebagai tempat penyelundupan dan perdagangan gelap. Hal ini membuat langkanya penjualan sembako dan tekstil di Aceh karena itu berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1950 terdapat larangan membawa keluar barang-barang tersebut melalui pelabuhan, 7 Maret 1950.

ANRI: Kabinet Presiden RIS No.249



Perahu-perahu berlabuh di pelabuhan perikanan Laut Flores, 1950.
ANRI, Kempen 80922 NN10



Foto udara yang diambil dari atas Pelabuhan Balai, 1950.
ANRI: KIT No. 907/13



Pemandangan pelabuhan Semarang dilihat dari laut, 1951.
ANRI: Kempen 3



Kapal korvet "Banteng" yang membawa rombongan Presiden Soekarno di Pelabuhan Merak, 1951.
ANRI: JB No. 5101/148



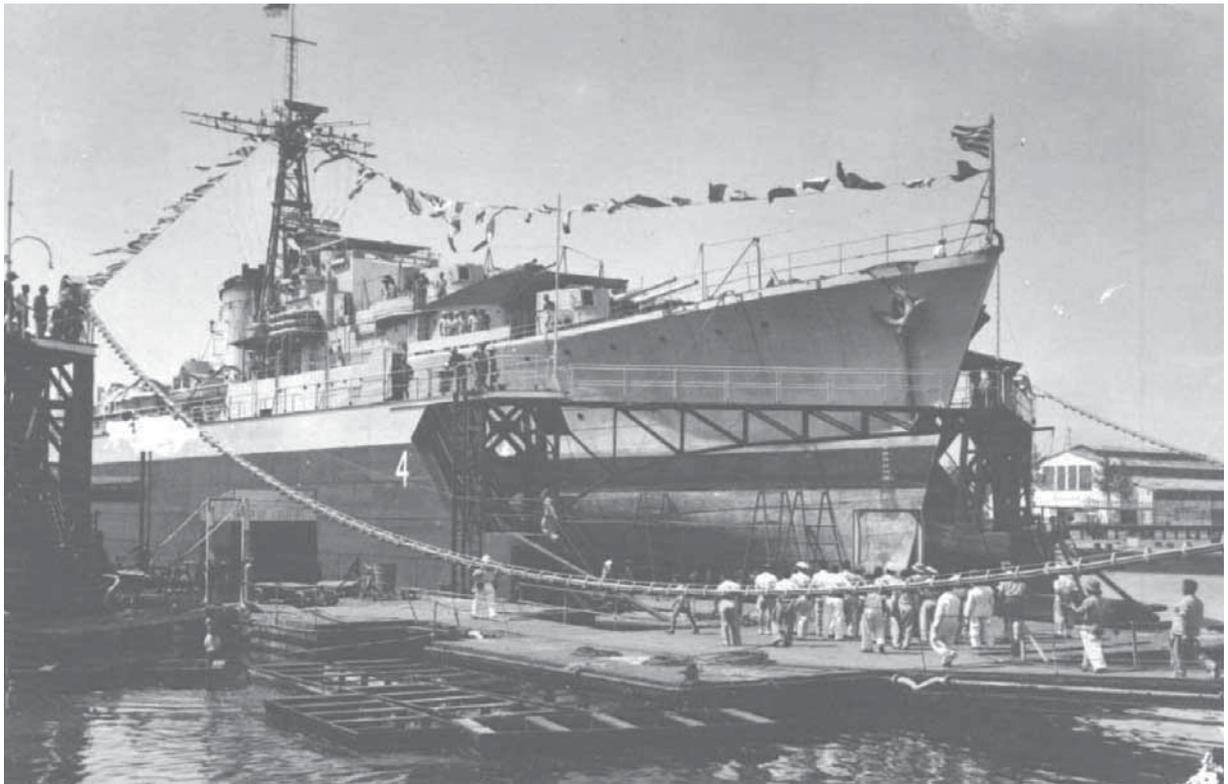
Pembuatan jaring udang oleh penduduk Sukadana Kabupaten Ketapang, 1951.
ANRI: Kempen No.510905 kk4





Hasil-hasil penangkapan ikan oleh rakyat di Ketapang, 1951.

ANRI: Kempen No.510821 kk27



Suasana Pelabuhan di Perusahaan Angkutan Laut Surabaya, Juli 1951.

ANRI: Kempen 514588



Kapal yang akan mengangkut barang-barang hasil bumi dari pulau ke pulau di pelabuhan Bima, 16 September 1951.

ANRI : Kempen No.510916 NN 6



Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Sudiro melakukan kunjungan ke Perusahaan Mutiara di Lalabusa (Bau-Bau) Sulawesi Tenggara, 26 Maret 1953.
ANRI : Djapen M 8229

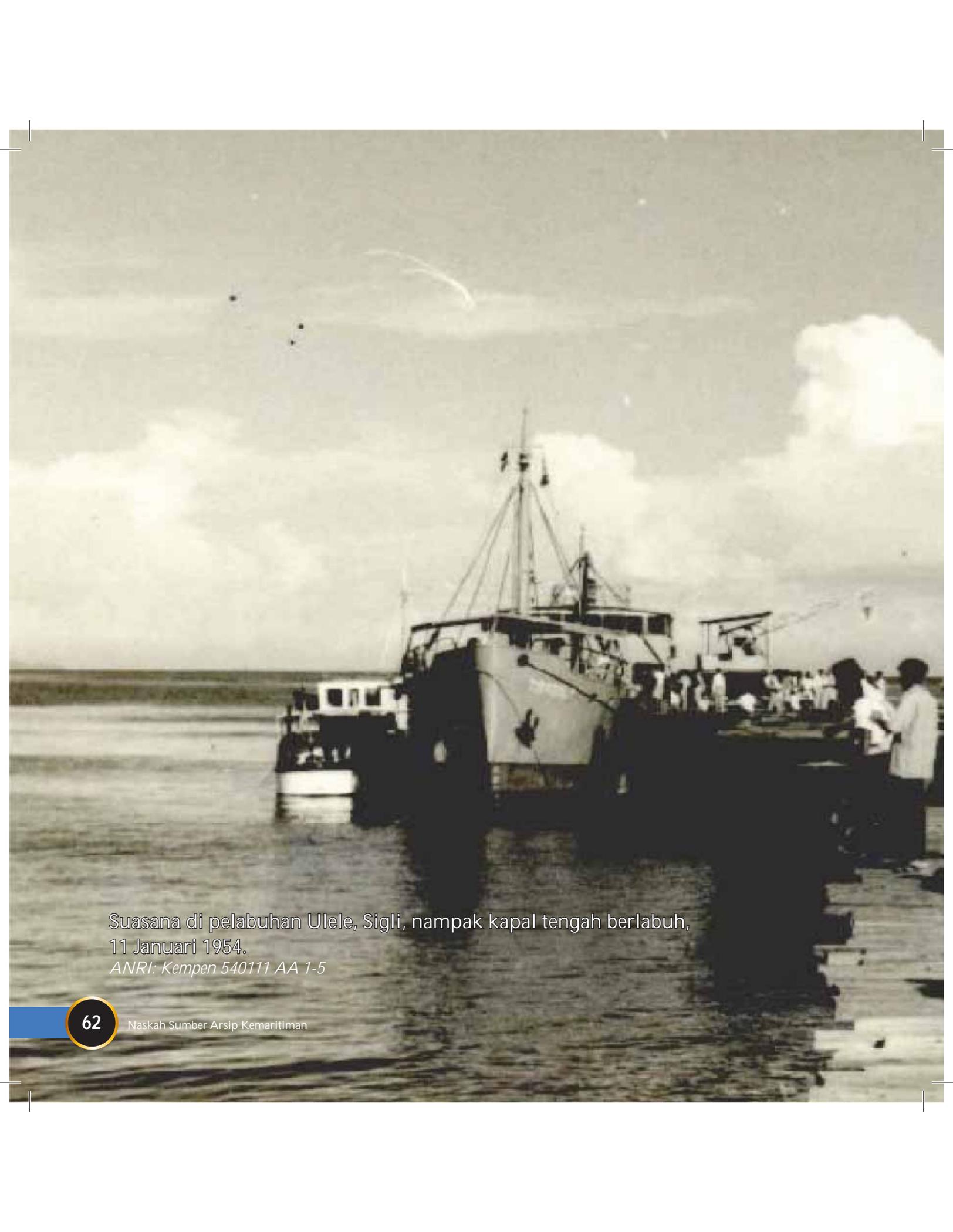


Pelabuhan Panjang di Lampung, 28 Juni 1952.
ANRI: Kempen No.K520628 DD-51



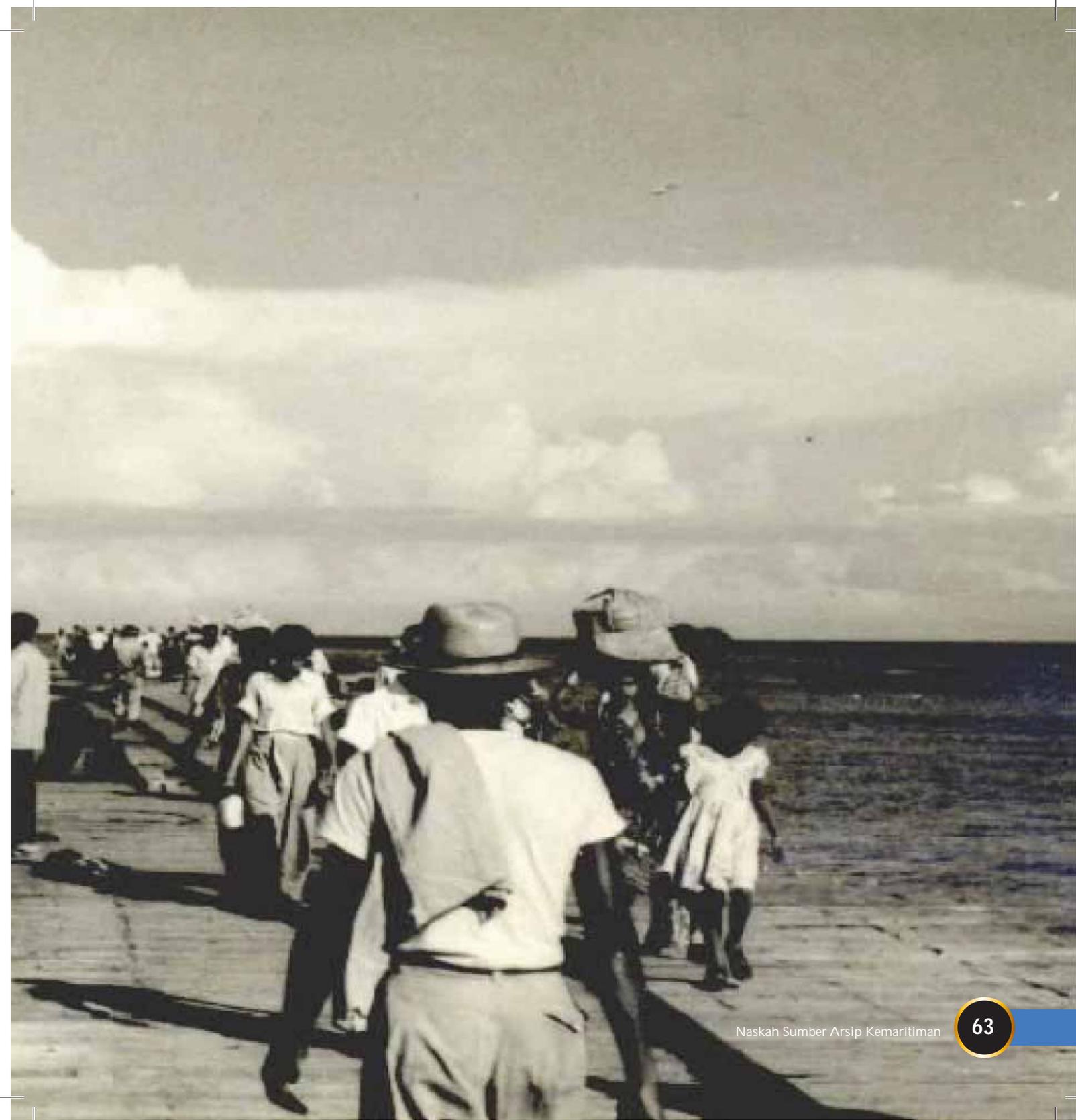
Pelabuhan Jambi ditepi Sungai Batanghari, tampak kapal-kapal laut yang sedang berlabuh, 8 Desember 1953.

ANRI: Kempen K 531208 DD1



Suasana di pelabuhan Ulele, Sigli, nampak kapal tengah berlabuh,
11 Januari 1954.

ANRI: Kempen 540111 AA 1-5



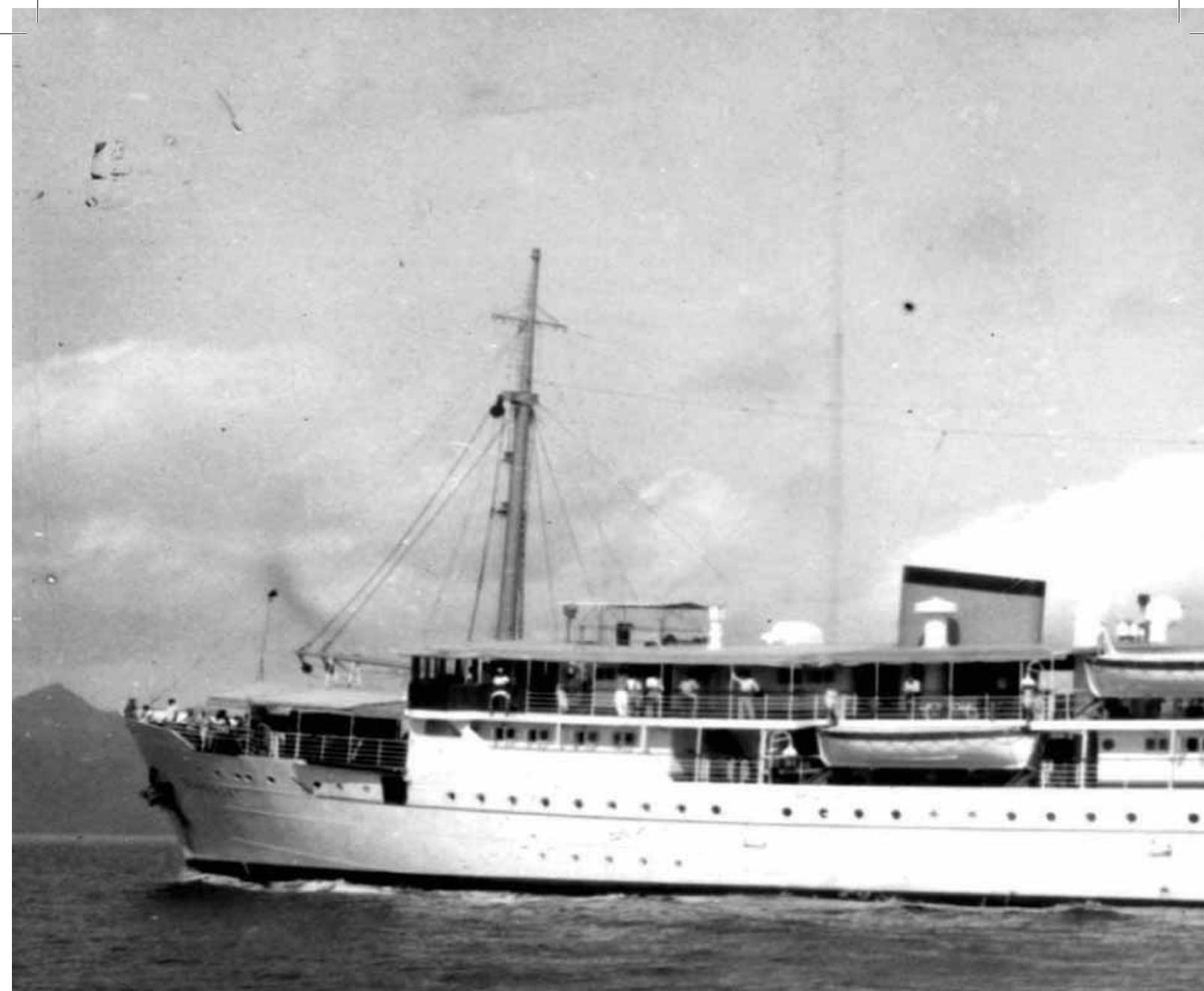


Pemandangan dari udara Pelabuhan Teluk Bayur, 6 Januari 1954.

ANRI: Kempen 540106 CC 3



Kegiatan penurunan minyak dari kapal minyak BPM ke dalam tangki persediaan untuk disalurkan ke seluruh Jawa Tengah, di pelabuhan Semarang, 12 Juli 1954.
ANRI: Kempen 540712 GN 1-6



Kapal Jadayat yang membawa Presiden Soekarno dan rombongan saat sedang melintasi perairan Kepulauan Sangihe Talaud, 22 Juli 1954.
ANRI: Kempen 540722 TT2





Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati menggunakan perahu menuju ke pantai di Tidore dalam rangkaian kegiatan perjalanan peninjauan ke Maluku Utara, 18 Juli 1954.

ANRI: Kempen 540718 V V 3-2





Gudang Yayasan Kopra di pantai Pelabuhan Wajabula, Pulau Morotai,
5 Juni 1954.

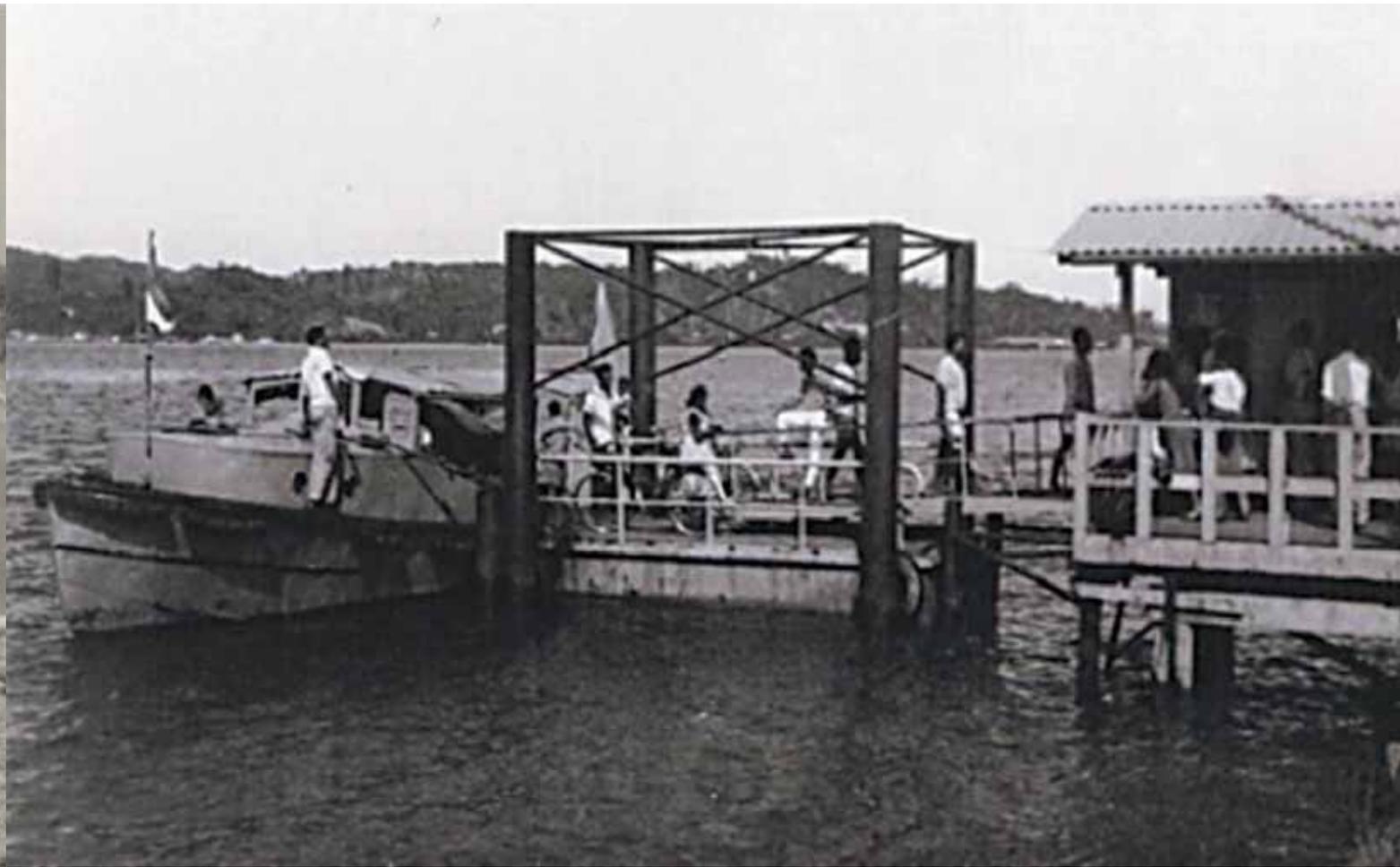
ANRI: Kempen 540605 V V 2-1



Salah satu kapal milik *Koninklijk Paketvaart Maatschappij* (KPM) sedang bersandar di pelabuhan Bengkulu, 16 Mei 1955.
ANRI: Kempen 550516 BB 1



Pelepasan perahu dari hasil kerajinan rakyat di Sulawesi Tenggara,
8 Agustus 1961.
ANRI: Djapen M 16283



Kapal bermotor kecil berlabuh di Dermaga Sorong, 1963.
ANRI, Kempen Wilayah Irian Jaya 63-738



Kapal Angkutan haji, Palembang, 1965.
ANRI: Kempen 65-055/1



Suasana pelabuhan "Tandjoeng Perak" yang difoto dari udara. Tampak salah satu kapal milik the Ocean Steamship Co. sedang berlabuh di pelabuhan tersebut.
ANRI: Kempen HN-B976-A.2683

Sumber selanjutnya:

1. Foto upacara penyerahan kapal pemburu torpedo "TJERK HIDDEN" oleh Angkatan Laut Belanda (Marine) kepada Angkatan Laut Republik Indonesia, Major Martadinata.
ANRI: Djawatan Penerangan Jatim No. F 130464,511345
2. Foto Presiden Soekarno bersama rombongan pada acara rapat samudra di Sabang, 14 maret 1953.
ANRI: Kempen 530314 AA 3-18
3. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati beserta KSAD Jendral Mayor Bambang Sugeng, para Perwira TT VII, para pengawal CPM berfoto bersama di atas kapal Jadayat, saat peresmian penggunaan pelabuhan Samudra Bitung di Manado. 15 Juli 1954.
ANRI: Kempen 540715 TT 41.
4. Foto Menteri Perhubungan F. Laoh sedang melihat-lihat peta rencana Kota Bitung, 5 Januari 1956.
ANRI: Kempen 560105 TT 44

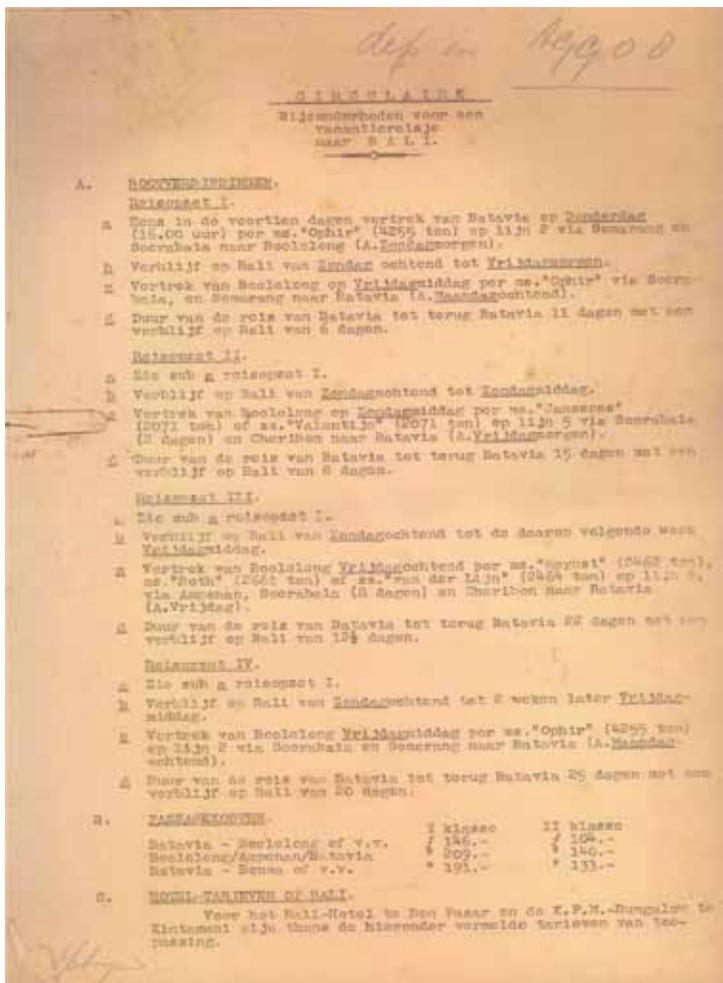
Peranan Jaringan Pelayaran dan Perdagangan

Dalam proses integrasi ekonomi di Indonesia peranan jaringan pelayaran dan perdagangan menjadi hal yang sangat penting. Keterlibatan perdagangan VOC di kawasan Asia Tenggara di masa awal lebih banyak bersifat perdagangan barang-barang lux, bernilai jual yang tinggi seperti emas, perak, mutiara, porselin, kain dsb. Disamping itu juga diperdagangkan komoditi hasil bumi seperti pala, cengkeh, lada dan kayu cendana.



Sinopsis

Koninklijke Paketvaart Maatschappij (Perusahaan paket pos kapal uap kerajaan) yang mulai beroperasi di Hindia Belanda tahun 1891, menangani hamper seluruh keperluan pelayaran pemerintah colonial di seluruh Indonesia. Jaringannya yang terus meluas menjadi unsur vital dalam perluasan kekuasaan Kolonial Belanda.



Surat Edaran dari N.V.
Koninklijke Paketvaart
Maatschappij mengenai
keistimewaan untuk berlibur/
bertamasya ke Bali,
6 April 1949.
ANRI: Alg. Secretarie no. 1367



Masyarakat menggunakan perahu di pelabuhan Sunda Kelapa, 1950.

ANRI: Kempen 500717 FG 9





Garam sebagai penghasilan rakyat Bima ditimbun di pelabuhan untuk dikirim ke kepulauan lain, 16 September 1951.

ANRI: Kempen No.510916 NN 5



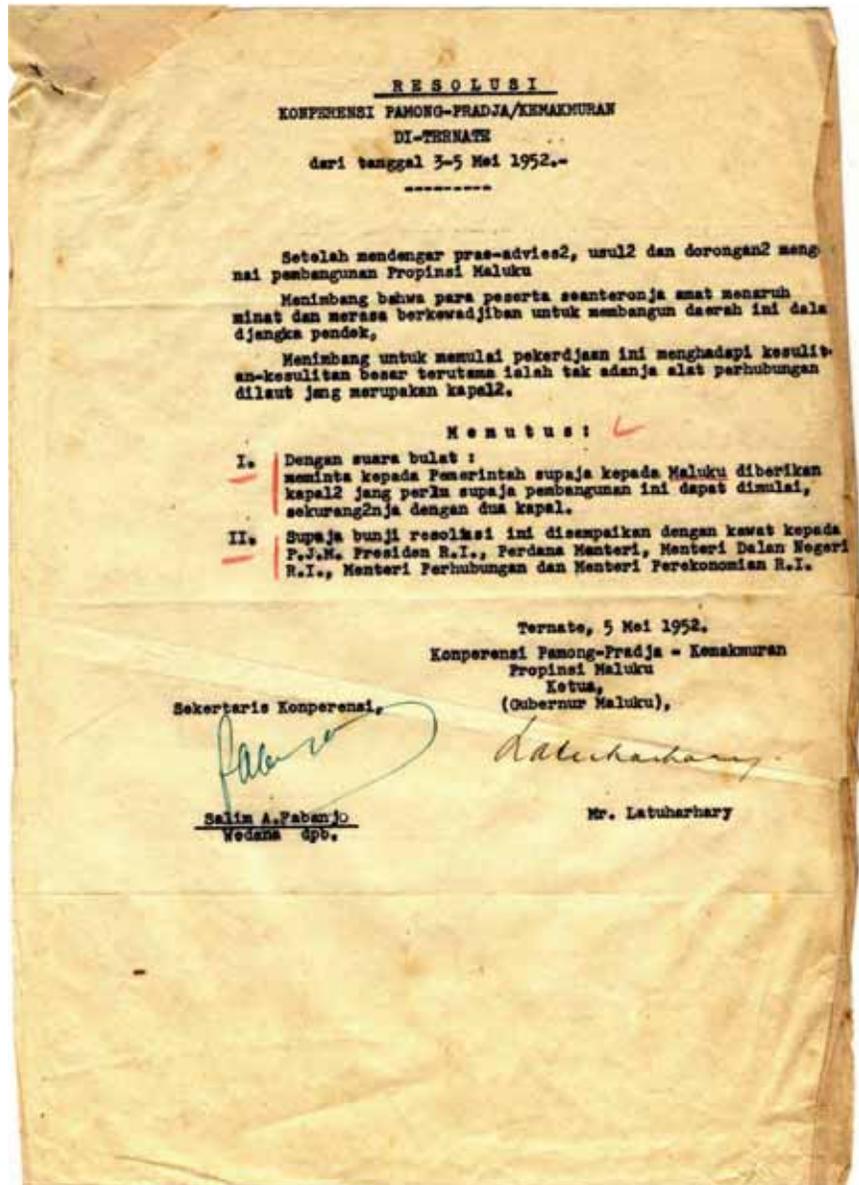
Pantai di Teluk Jakarta, 1950.
ANRI: Kempen 540822 FH 2



Kapal motor "Bango" alat transportasi laut di Makassar, Sulawesi Selatan,
11 Desember 1952.

ANRI, Djapen Sulawesi M7876

Resolusi Konferensi
Pamong Praja –
Kemakmuran Propinsi
Maluku di Ternate
tentang permintaan
dua buah kapal,
5 Mei 1952.
*Anri: Kabinet Presiden
No. 2204*





Pasar penjualan ikan di tepi sungai di Pasar Haranggaol, 1952.
ANRI: KIT No. 370/68



Hasil ikan laut yang ditangkap, 23 Juni 1952.
ANRI: Kempen No.520623 DD-22



Pemandangan di Pelabuhan Makassar dengan perahu layar yang akan memuat rotan, 12 Agustus 1953.
ANRI, Kempen 530812 RR 5



Pemandangan di sekitar pelabuhan Cirebon, terlihat pangkalan kapal-kapal penarik sampan tempat kapal berlabuh, Cirebon, 14 November 1953.

ANRI : Kempen 531114 FY 6



Lembaran-lembaran karet ("sheet") hasil perkebunan rakyat Jambi sedang dikumpulkan untuk menanti pengangkutan melalui kapal laut yang akan berlabuh di sekitar pelabuhan Jambi, 1953.

ANRI: Kempen Sumatera Selatan No. 531208-DD3K.



Dua orang wanita sedang menata bawang merah yang merupakan hasil pertanian rakyat Sumbawa di pelabuhan Sape untuk diangkut dengan perahu keluar daerah, 1 November 1954.

ANRI : Kempen No. 541101 NN 11

GUBERNUR KEPALA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MATARAM (LOMBOK)

No. Pemek. 33/17/125.

Mataram, 26 Februari 1969.

Lamp.

Hal Permohonan membeli kapal
KARAWATU ex PELNI.-

Kepada

Jth. 1. Bapak Menteri Keuangan
2. Bapak Menteri Perhubungan
di-
DJAKARTA.

Dengan hormat.

1. Kami Pemerintah Nusa Tenggara Barat menjabut dengan gembira Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan tanggal 8 Januari 1969 No. Kep. -5/KP/1/69, tentang PENENTUAN NILAI DARI No. K.14/1/5 pbb PADA KAPAL KAPAL MILIK PT.PELNI SEBAGAI PERUSAHAAN MODAL, berikut dengan lampiran.
2. Dari lampiran tersebut kami menjabut daftar nama2 kapal, tife, Dwt, tahun pembuatannya dengan nilai Dl. US \$ dengan kurunja dalam rupiah yang djumlahnja ± 86 buah kapal.
3. Jang menarik perhatian kami adalah kapal Karawatu tife Gen.Cargo, DWT 2252/172 ex pembuatan 1957 harga US \$ 224.500 nilai Rp.73.187.000.
4. Sebagai dimaklumi bahwa Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari gugusan Pulau2 jang sangat memerlukan alat perhubungan baik dengan kapal laut, maupun udara untuk tugas pemerintahan, kelantjaran ekonomi/perdagangan interinsulair maupun export dan penumpang umum, dimana alat2 pengangkutan untuk itu sangat kurang sekali, lebih2 untuk menghadapi Kependita tahun 1969 ini.
5. Berhubung dengan itu kami sangat berhaarat untuk memiliki sebuah kapal untuk mengatasi kesulitan perhubungan tersebut.
6. Maka berkenaan dengan hal2 diatas sesuai pula dengan Surat Keputusan Bersama tersebut maka dengan ini kami mengajukan permohonan/selamar untuk turut serta membeli kapal ex PELNI bila kapal Karawatu sebagai tersebut pada angka 3 diatas dengan sjarat2 jang lebih ringan.
7. Technis pelaksanaan pembajarannya kami luasakan kepada P.T.Pelajaran Nusantara Nusantara, dan selanjutnja pengoperasian kapal tersebut akan diserahkan kepada P.T.Pelajaran Nusantara Nusa Tenggara dimana Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki saham 20 %.

Mengharap lamaran ini dapat diterima dan memperoleh kabar setcepatnja untuk langkah selanjutnja.



TEMBUAN dikirim kepada :

Direktur P.T.Pelajaran Nusantara
Nusa Tenggara di Denpasar.-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Oktober 1997

Nomor : B- 512 /Pres/10 /1997
Sifat : Segera
Lampiran : —
Perihal : Persetujuan penanaman modal
asing.

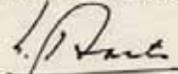
Kepada Yth.
Sdr. Menteri Negara Ponggerak Dana
Investasi/Ketua BKPM
di
Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri Nomor: 593/A.1/1997 tanggal 12 Agustus 1997 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui perancangan penanaman modal asing antara PT Bone Commercial Company - Indonesia bekerja sama dengan Korea Cholsan General Trading Corporation - Republik Korea yang akan berusaha di bidang industri kapal dan galangan kapal, berlokasi di Kabupaten Kendari - Sulawesi Tenggara (harus sesuai dengan RUTR/RDTR daerah setempat), dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Ponggerak Dana Investasi/BKPM bersama Departemen Perindustrian dan Perdagangan supaya memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

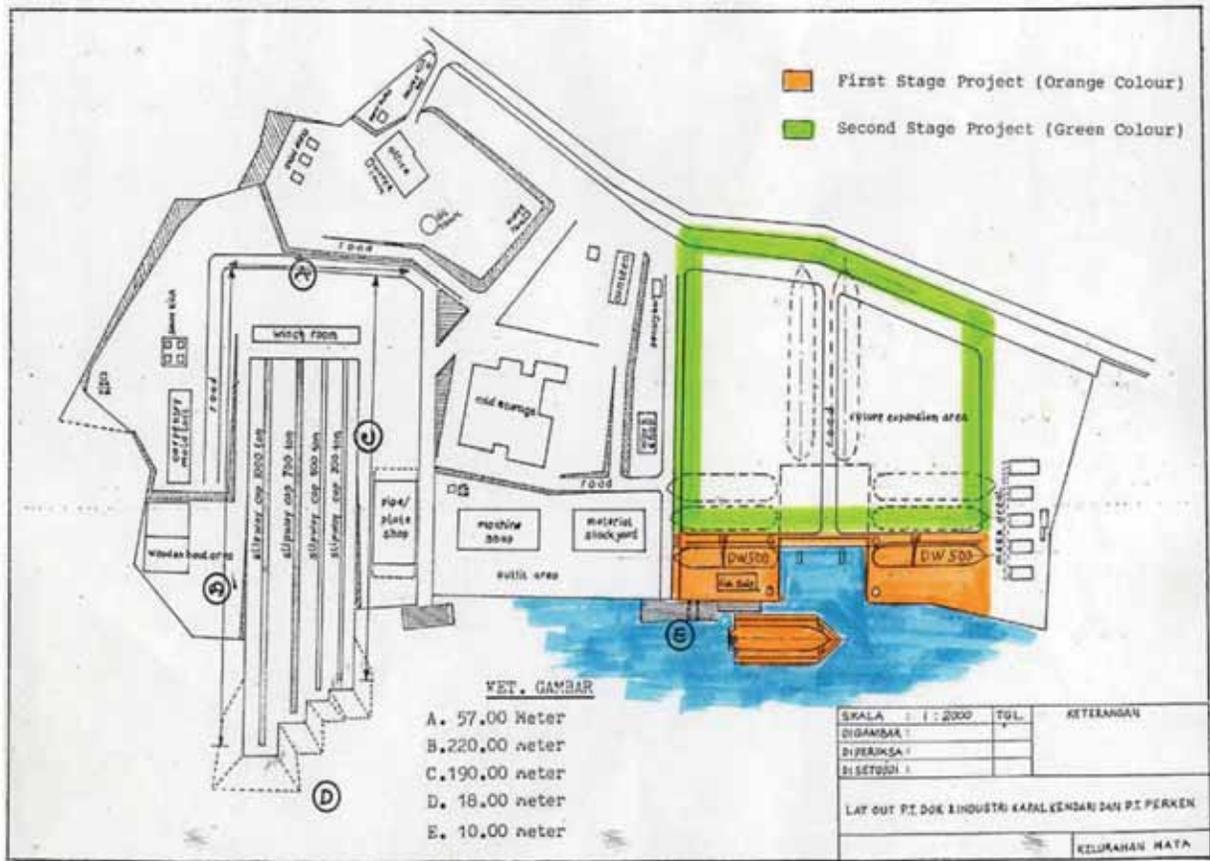

SOEHARTO

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia

Surat persetujuan Presiden Soeharto tentang Penanaman Modal Asing (PMA) antara PT. Bone Commercial Company – Indonesia dengan Korea Cholsan General Trading Corporation Republik Korea di bidang Industri kapal dan galangan kapal di Kabupaten Kendari-Sulawesi Tenggara. 6 Oktober 1997.

ANRI: Sekretariat Negara, Asisten Administrasi III No. 601



Sket proyek pertama dan kedua pembangunan industri kapal di Kendari, 1997.
 ANRI: Sekretariat Negara, Asisten Administrasi III No. 601

Sumber selanjutnya:

1. Berita mengenai blokade Belanda di perairan Aceh; terjadi penggeledahan terhadap kapal-kapal dagang di Aceh, 25 Juli 1948. ANRI: Kementerian Penerangan No.100
2. Pulau Weh sejak dulu terkenal sebagai tempat penyelundupan dan perdagangan gelap. Hal ini membuat langkanya penjualan sembako dan tekstil di Aceh kerana itu berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1950 terdapat larangan membawa keluar barang-barang tersebut melalui pelabuhan. 7 Maret 1950. ANRI: Kabinet Presiden RIS No. 249

Peranan Lokal dan Tradisional: Transportasi Sungai, Hilir Pelabuhan Laut

Dinamika pemanfaatan alat transportasi sungai yang berhilir di pelabuhan laut sudah dikenal jauh sebelum masa kemerdekaan. Peranan lokal sejalan dengan berkembangnya pelabuhan laut yang telah mendominasi kegiatan perekonomian masyarakat, baik dalam mengangkut kayu hasil hutan dengan Kapal tongkangnya, maupun sebagai alat transportasi didalam melakukan transaksi perdagangan, alat transportasi seperti kendaraan umum bus dan taksi sudah dikenal sejak awal masa kemerdekaan seperti yang dapat terlihat dengan jelas melalui khasanah arsip yang terekam.

Hubungan dagang, pada masa awal berbentuk tukar menukar barang, didorong oleh kebutuhan masing-masing akan bahan pokok, misalnya penduduk pegunungan memerlukan garam dari penduduk pantai, sedangkan penduduk pantai membutuhkan hasil hutan dari pedalaman. Namun dalam hal perdagangan antar pulau, pelaksanaan perhubungan memerlukan kemampuan berlayar, baik kemahiran membuat perahu atau kapal sebagai alata angkutan, maupun pengetahuan navigasi untuk mencapai tujuannya.





Perahu yang digunakan nelayan Lamalerap, Nusa Tenggara Timur untuk menangkap ikan paus, 22 September 1948.

ANRI: Rvd. 80922 NN 11



Pemandangan Kota Pontianak dengan sampan-sampan di depan rumah. 1951.
ANRI: Kempen No.516819



Perahu-perahu untuk alat pengangkutan sungai di Pontianak, 1951.

ANRI: Kempen No.516829



Perahu Khas Batak (Soloe) yang sedang berlabuh di Danau Toba, 1950.
ANRI: KIT No. 538





Perahu-perahu layar Bugis, alat transportasi laut sedang berlayar di sekitar pelabuhan Palopo, Sulawesi Selatan, 11 Oktober 1953.

ANRI: Kempen 531011 RR 3



Transportasi perahu layar di Pelabuhan Bima, 1954.
ANRI, RVD D 541102 NN6



Perahu-perahu Kolok di tepi pantai Pelabuhan Manado, 3 April 1954.
ANRI, Kempen 540403 TT6

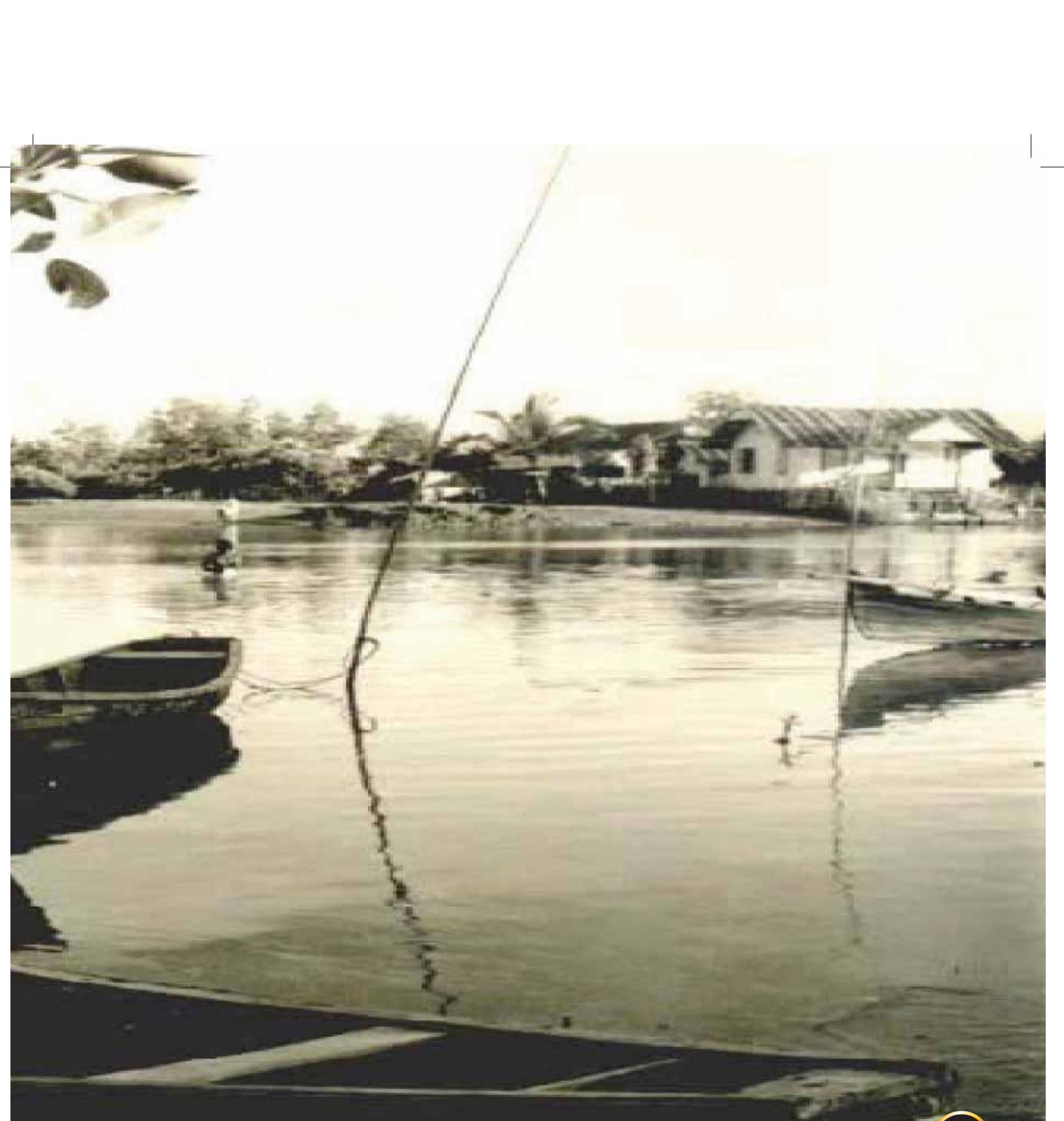


Perahu Kollek sebagai alat transportasi tambangan di Pelabuhan Tobelo,
Halmahera, 8 Juni 1954.
ANRI: Kempen 540608 V V 9



Perahu-perahu nelayan di muara sungai Asahan, Ulele, Sigli, 12 Januari 1954.

ANRI: Kempen 540112 AA 10





Pemandangan di Pantai Anyer, Banten dengan perahu nelayan yang sedang berlabuh, 3 Maret 1955.

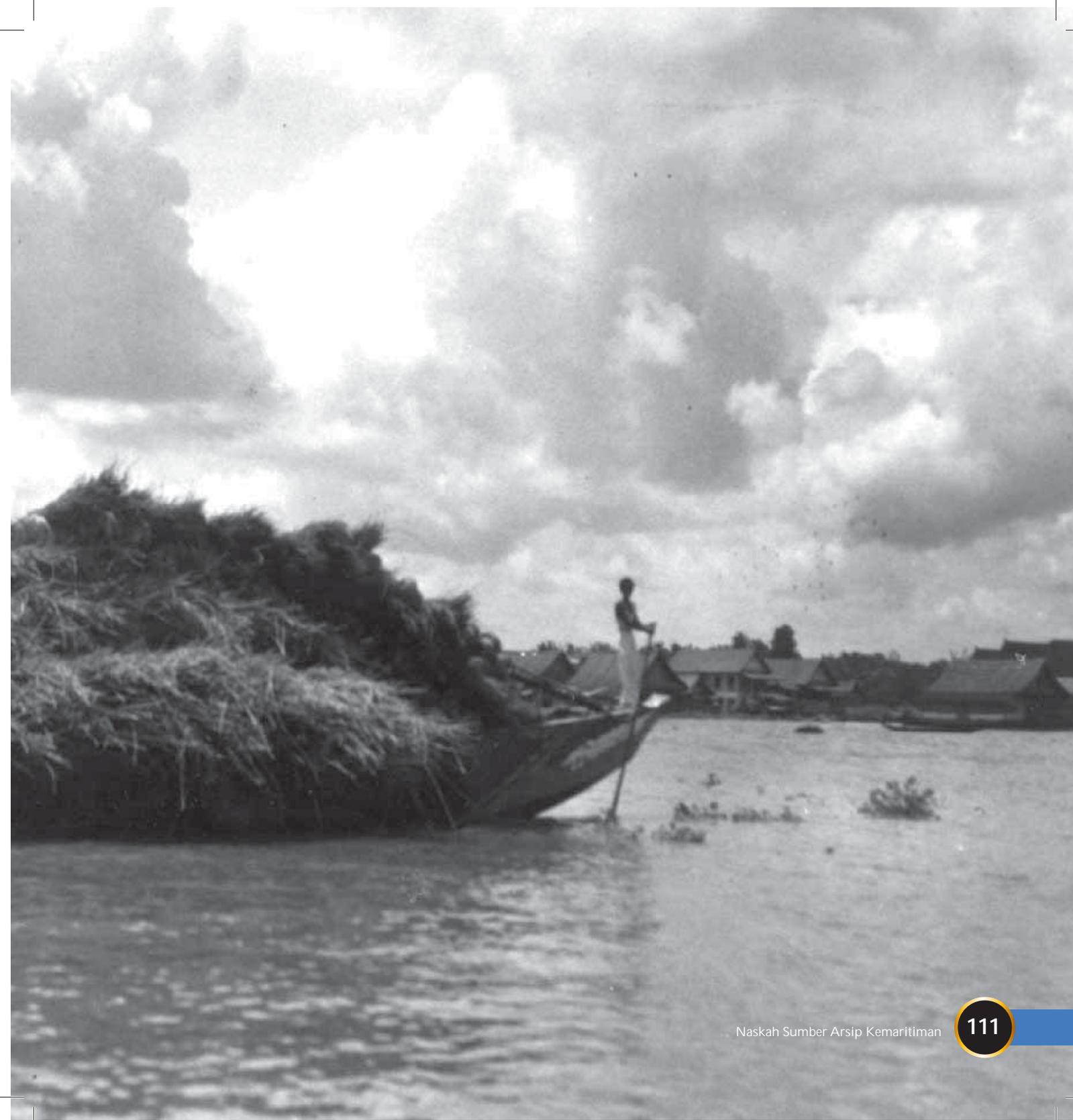
ANRI: Dipenra JB. No. 5502/110



Seorang nelayan sedang mengecat perahu di tepi Pantai Mauk, Tangerang, 1957.
ANRI: Dipenra JB NO. 5701/139



Rotan hasil hutan diangkut dengan kapal motor di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, 19 April 1951.
ANRI: Kempen 512296





Lalu lintas di sungai terlihat beberapa sampan memuat umat muslim yang akan pergi ke masjid di Pontianak, 1951.

ANRI:Kempen No. 516886



Pelabuhan Jambi di tepi Sungai Batanghari (Jambi) terlihat suasana bongkar muat barang, 8 Desember 1953.

ANRI: Kempen K 531208 DD 2



Penyeberangan di Sungai Batanghari untuk menghubungkan lalulintas di
Jambi, 8 Desember 1953.
ANRI: Kempen K 531208 DD 26



BIBLIOGRAFI

1. *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek Nederlandsch-Indie*, 1869; Eerste –Vierde Deel, PN van Kamp- Amsterdam, 1869
2. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, 1921; Eerste Gedeelte; Landsdrukkerij-Batavia, 1921
3. *Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie*, 1939; Eerste Gedeelte; Landsdrukkerij- Batavia, 1939
4. Early Modern History – Indonesian Heritage, Anthony Reid.ed., Vol.3 – Archipelago Press, Singapore repr.1999,2001
5. “Arung Samudera” *Persembahan Memperingati Sembilan Windu AB Lapiar*; Edi Sedyawati dan Susanto Zuhdi (penyunting); PPKB LPUI 2001
6. Ricklefs, MC, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2001*; Cet.III – PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007
7. Lapiar, Adrian B, *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*; Jakarta: Komunitas Bambu, 2009
8. *Melestarikan Memory Kolektif Bangsa*, Arsip Nasional RI – Jakarta, 2012
9. “Membedah Sejarah dan Budaya Maritim Merajut Keindonesiaan” *Persembahan untuk Prof.Dr.AM Djuliaty Suroyo*; Ed. Danang Respati Puguh et.al; Undip Press Semarang, 2013
10. “Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim”; Prof.Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, Ms.; Institut Pertanian Bogor, 2014

